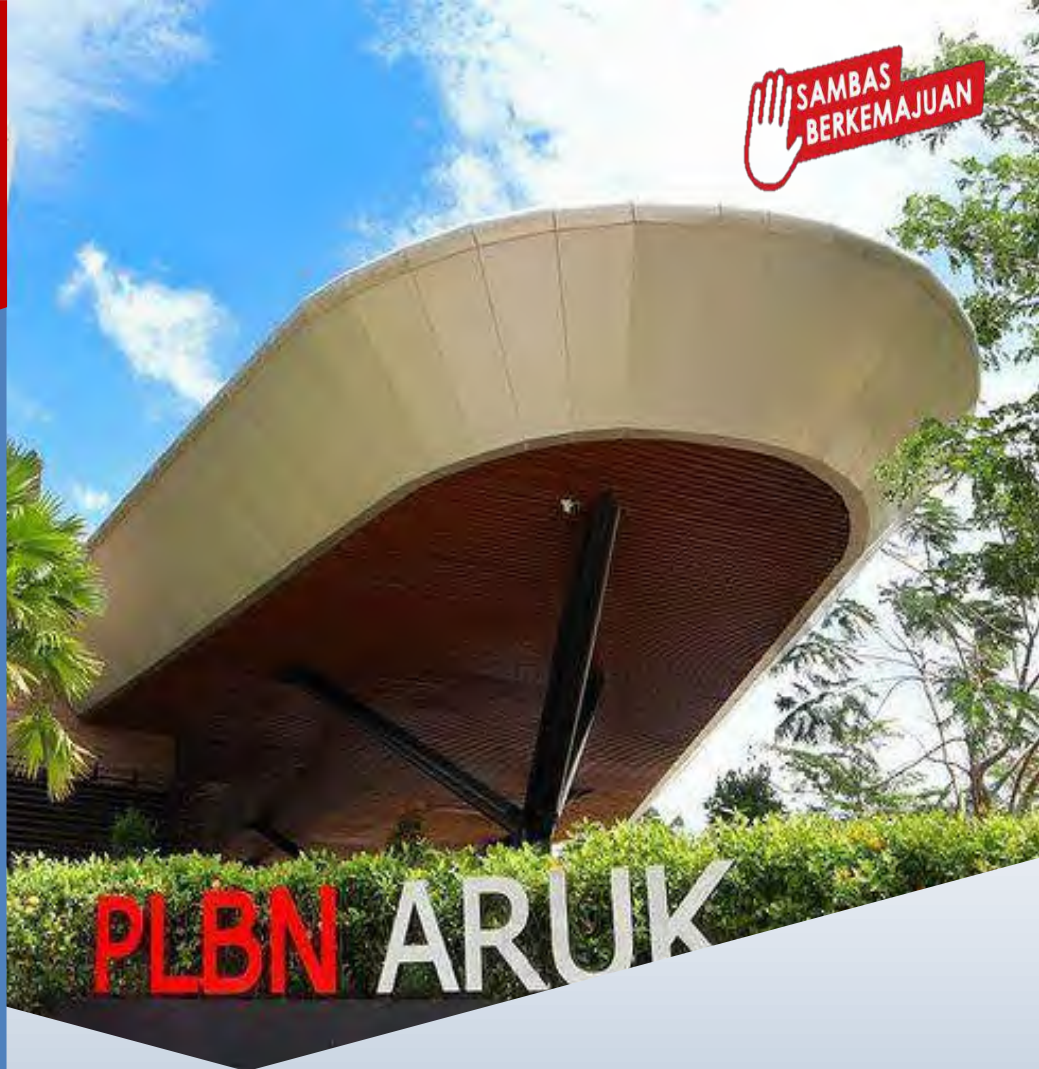




**SAMBAS
BERKEMAJUAN**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

Jl. Pembangunan Nomor 82 (79462) Telp. (0562) 392454 Fax (0562) 392443
Email : setda.kab.sambas@gmail.com Website : www.sambas.go.id

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Pemerintah Kabupaten Sambas telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2022 yang merupakan salah satu bagian dari capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan tahun pertama Bupati dan Wakil Bupati Sambas. Laporan ini merupakan sarana pelaporan yang menggambarkan pencapaian pembangunan yang tertuang dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 yaitu *“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”*.

Laporan ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kepada berbagai pihak untuk dapat memberikan saran perbaikan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan laporan ini. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2022 dapat bermanfaat bagi kita semua dan untuk dijadikan bahan acuan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu dapat pula dijadikan bahan evaluasi yang objektif bagi pimpinan dalam rangka mengambil kebijakan untuk peningkatan kinerja yang lebih baik.

Sambas, Maret 2023



H. SATONO, S.Sos.I., M.H.



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Pembangunan Sambas No. 80 (79462)

Telp. (0562) 392544 Fax. (0562) 392544 Email. Inspektoratkab.sambas@gmail.com

Website : <https://inspektorat.sambas.go.id>

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2022

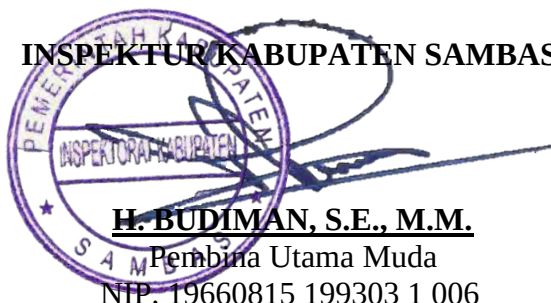
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sambas untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Sambas.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sambas, Maret 2023

INSPEKTUR KABUPATEN SAMBAS,

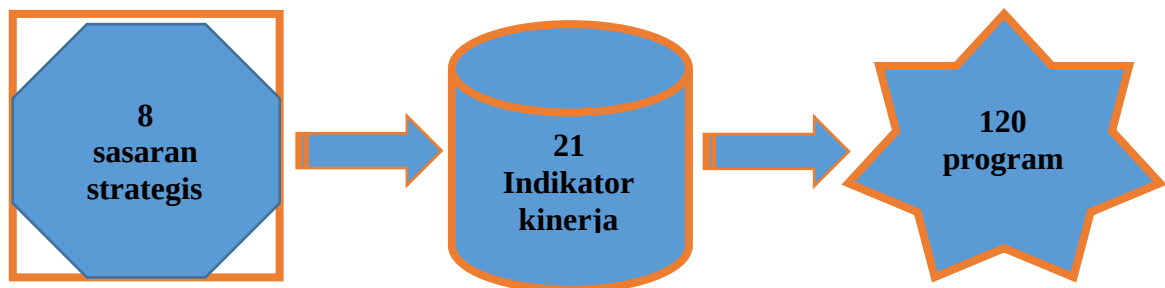

H. BUDIMAN, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660815 199303 1 006



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2022 menyajikan informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2022 yang didasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sambas tahun 2021-2026. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tahun pertama Bupati dan Wakil Bupati Sambas atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk mencapai agenda pembangunan dari visi yaitu:

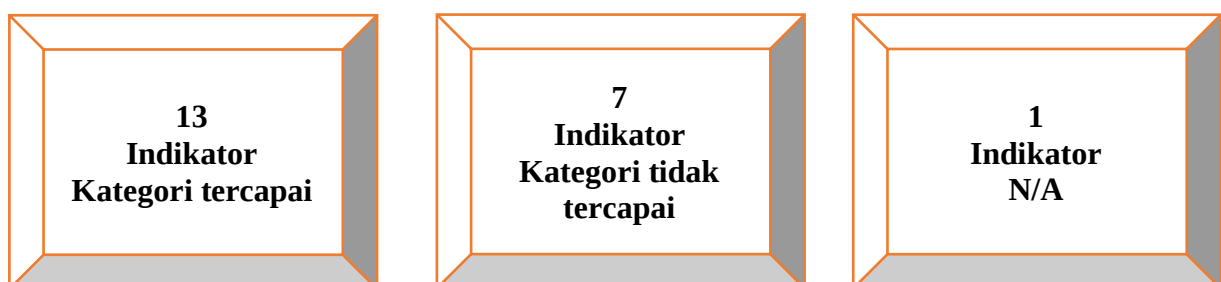
“Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas terdiri atas :



Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 dan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sambas, Pemerintah Kabupaten Sambas memiliki 8 (delapan) sasaran strategis dan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja yang menjadi *core business* untuk mengukur pencapaian kinerja tersebut dan diperlukan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dengan jumlah sebesar Rp 1.226.578.658.512,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 1.128.438.269.574,00 atau 92 persen.

Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas:





Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 8 (delapan) sasaran strategis dan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja, maka sebanyak 13 (tiga belas) indikator kinerja mencapai target di atas 100% sedangkan 7 (tujuh) indikator kinerja mencapai target di bawah 100%, serta sebanyak 1 (satu) indikator kinerja belum dapat diukur capaian kinerjanya sehingga jika dilihat rata-rata capaian kinerja secara umum dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2022 telah berhasil mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Sambas.

Beberapa hal yang menjadi perhatian terkait hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2022 antara lain :

1. Laju pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkat namun masih dibayangi oleh dampak negatif pandemi covid 19, ancaman resesi global dan perubahan iklim.
2. Masih rendahnya infrastruktur dalam kondisi mantap sehingga kurang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kabupaten Sambas.
3. Tingkat pengangguran terbuka yang masih cenderung meningkat ditengah kondisi ekonomi yang mulai membaik.
4. Jumlah penduduk miskin yang masih tergolong tinggi dan persentase kemiskinan masih diatas rata-rata Provinsi Kalimantan Barat.
5. Indeks pembangunan manusia yang sudah cukup baik di Kalimantan Barat, namun masih dihadapkan pada kondisi rendahnya angka Rata-Rata Lama Sekolah (RTLS) dan Angka Harapan Hidup (AHH).
6. Masih tingginya potensi terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan, aktivitas masyarakat dan akibat dampak bencana alam.
7. Masih tingginya Indeks Resiko Bencana Daerah terutama yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, banjir, kekeringan, abrasi dan cuaca ekstrim.
8. Belum optimalnya penerapan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan beberapa perbaikan agar target kinerja dapat dicapai sesuai dengan yang ditetapkan, antara lain :

1. Meningkatkan komitmen seluruh pimpinan dalam penerapan manajemen kinerja melalui pengintegrasian sistem perencanaan kinerja dan penganggaran serta meningkatkan kualitas mekanisme sistem pengukuran kinerja organisasi dan individu, sebagai sarana



pemantauan kinerja oleh pimpinan dan juga sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;

2. Melaksanakan reviu terhadap dokumen SAKIP kabupaten dan perangkat daerah agar terjamin kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan (*integrated development plan*), serta mekanisme *cascade* kerja sehingga dokumen perencanaan lebih berorientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan masyarakat (*result oriented*),
3. Lebih memperhatikan pencapaian target kinerja jangka menengah, tidak hanya kinerja kabupaten tapi sampai dengan kinerja perangkat daerah.
4. Menyusun Peraturan teknis terkait evaluasi internal yang dilaksanakan oleh APIP dalam melaksanakan evaluasi kepada seluruh perangkat daerah.
5. Membangun aplikasi e-SAKIP Kabupaten Sambas yang merupakan sistem pengelolaan data kinerja terpadu yang bisa diunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintahan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Evaluasi RKPD.



Kata Pengantar	i
Pernyataan Telah Direviu	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Grafik	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Kabupaten Sambas	2
1.2.1. Kondisi Geografis	2
1.2.2. Kondisi Topografi	3
1.2.3. Kondisi Demografis	4
1.2.4. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
1.2.5. Sumber Daya Aparatur	9
1.2.6. Sumber Daya Keuangan	10
1.3. Permasalahan Utama (<i>Issue Strategic</i>)	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Sambas.....	15
2.1.1. Visi	15
2.1.2. Misi	16
2.1.3. Tujuan	17
2.1.4. Sasaran	18
2.1.5. Strategi	18
2.1.6. Arah Kebijakan	21
2.1.7. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi	24
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas.....	30
3.2. Analisis Capaian Kinerja	32



	3.3. Realisasi Anggaran	102
	3.3.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022	102
	3.3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022	105
BAB IV	PENUTUP	111
	4.1. Kesimpulan	111
	4.2. Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja	113
Lampiran	: Pengukuran Kinerja Tahun 2022 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	

DAFTAR TABEL



Tabel	1	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sambas Tahun 2022	5
Tabel	2	Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sambas Tahun 2022	6
Tabel	3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sambas berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan dan Golongan (orang) Tahun 2020-2022 (Keadaan Bulan Desember 2022)	10
Tabel	4	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sambas berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan (orang) Tahun 2020-2022	10
Tabel	5	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	11
Tabel	6	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	25
Tabel	7	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2022	28
Tabel	8	Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2022	30
Tabel	9	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.....	32
Tabel	10	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021-2022	35
Tabel	11	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2022	36
Tabel	12	Perbandingan Realisasi dan Realisasi Kinerja Indikator Pertumbuhan Ekonomi dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	36
Tabel	13	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 1	38
Tabel	14	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2	40
Tabel	15	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Gini Tahun 2021-2022	41
Tabel	16	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Gini Tahun 2019-2022	41
Tabel	17	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Gini dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	42
Tabel	18	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Angka Kemiskinan Tahun 2021-2022	43

DAFTAR TABEL



Tabel	19	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Angka Kemiskinan Tahun 2019-2022	43
Tabel	20	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Angka Kemiskinan dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	44
Tabel	21	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Pemangunan Manusia (IPM) Tahun 2021-2022	47
Tabel	22	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019-2022	47
Tabel	23	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Manusia dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	47
Tabel	24	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Harapan Lama Sekolah Tahun 2021-2022	49
Tabel	25	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Harapan Lama Sekolah Tahun 2019-2022	49
Tabel	26	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Harapan Lama Sekolah dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	50
Tabel	27	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2021-2022	51
Tabel	28	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2019-2022 ..	51
Tabel	29	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Rata-Rata Lama Sekolah dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	52
Tabel	30	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Angka Harapan Hidup Tahun 2021-2022	53
Tabel	31	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Angka Harapan Hidup Tahun 2019-2022	53
Tabel	32	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Angka Harapan Hidup dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	53
Tabel	33	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 2	54
Tabel	34	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3	56
Tabel	35	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021-2022	57

DAFTAR TABEL



Tabel	36	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2022	57
Tabel	37	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	58
Tabel	38	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 3	59
Tabel	39	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4	60
Tabel	40	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Resiko Bencana Tahun 2021-2022	61
Tabel	41	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Resiko Bencana Tahun 2019-2022	61
Tabel	42	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Resiko Bencana dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	61
Tabel	43	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 4	62
Tabel	44	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5	64
Tabel	45	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap Tahun 2021-2022	65
Tabel	46	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap Tahun 2019-2022	65
Tabel	47	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	66
Tabel	48	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Jalan Poros Desa Dalam Kondisi Mantap Tahun 2021-2022	67
Tabel	49	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Jalan Poros Desa Dalam Kondisi Mantap Tahun 2019-2022	67
Tabel	50	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Jalan Poros Desa Dalam Kondisi Mantap dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	67
Tabel	51	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2021-2022	69
Tabel	52	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2019-2022	69

DAFTAR TABEL



Tabel	53	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Rasio Jaringan Irigasi dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	69
Tabel	54	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Rasio Tersedianya Dermaga/Steher untuk Melayani Aksesibilitas Orang dan Barang Tahun 2021-2022	70
Tabel	55	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Rasio Tersedianya Dermaga/Steher untuk Melayani Aksesibilitas Orang dan Barang Tahun 2019-2022	71
Tabel	56	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Rasio Tersedianya Dermaga/Steher untuk Melayani Aksesibilitas Orang dan Barang dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	71
Tabel	57	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Tahun 2021-2022	72
Tabel	58	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Tahun 2019-2022	73
Tabel	59	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	73
Tabel	60	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2021-2022	75
Tabel	61	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2019-2022	75
Tabel	62	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Rumah Tangga Bersanitasi dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	75
Tabel	63	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021-2022	76
Tabel	64	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2019-2022	77
Tabel	65	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Tidak Layak Huni dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	77
Tabel	66	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 5	78

DAFTAR TABEL



Tabel	67	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6	79
Tabel	68	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Nilai SAKIP Tahun 2021-2022	80
Tabel	69	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai SAKIP Tahun 2019-2022 ..	80
Tabel	70	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Nilai SAKIP dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	81
Tabel	71	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2022	87
Tabel	72	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2022	87
Tabel	73	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	87
Tabel	74	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda Tahun 2021-2022	90
Tabel	75	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda Tahun 2019-2022	91
Tabel	76	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	91
Tabel	77	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 6	92
Tabel	78	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7	94
Tabel	79	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Desa Mandiri Tahun 2021-2022	96
Tabel	80	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Desa Mandiri Tahun 2019-2022	96
Tabel	81	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Desa Mandiri dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	96
Tabel	82	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 7	97
Tabel	83	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8	98
Tabel	84	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2022	99

DAFTAR TABEL



Tabel	85	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2022	100
Tabel	86	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	100
Tabel	87	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 8	101
Tabel	88	Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022	103
Tabel	89	Rincian Dana Perimbangan Tahun 2022	103
Tabel	90	Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022	104
Tabel	91	Rincian Belanja Daerah pada Tahun 2022	104
Tabel	92	Anggaran dan Realisasi Belanja Sasaran Strategis Tahun 2022	105

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1	Peta Wilayah Administratif Kabupaten Sambas	2
----------	---	---

DAFTAR GRAFIK



Grafik	1	Luas Kecamatan (Km2) Kabupaten Sambas Tahun 2022	3
Grafik	2	Persentase Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas Tahun 2022	4



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia setiap penyelenggaraan pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup komponen perencanaan kinerja, komponen pengukuran kinerja, komponen pelaporan kinerja dan komponen evaluasi internal.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sambas merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang mana untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah di atas, maka dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sambas berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas 2021-2026, dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sambas dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Sambas Tahun 2022.

Tahun 2022 merupakan pelaporan tahun pertama pencapaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sambas. Dengan demikian, Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2022 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.2 Gambaran Umum Kabupaten Sambas

1.2.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Sambas terletak di bagian paling utara Provinsi Kalimantan Barat atau diantara $0^{\circ}57'29,8^{\circ}$ dan $2^{\circ}04'53,1^{\circ}$ Lintang Utara serta $108^{\circ}51'17,0^{\circ}$ dan $109^{\circ}45'7,56^{\circ}$ Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini, maka daerah Kabupaten Sambas termasuk salah satu kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara asing yaitu Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Secara administratif, letak geografis Kabupaten Sambas berbatasan dengan :

Utara : Serawak (Malaysia Timur) dan Laut Natuna
Selatan : Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang
Timur : Kabupaten Bengkayang dan Serawak (Malaysia Timur)
Barat : Laut Natuna

Gambar 1
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Sambas



Sumber : Buku Profil Kabupaten Sambas Tahun 2022.

Luas Wilayah Kabupaten Sambas adalah 6.394,70 km² atau sekitar 4,36% dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat. Panjang pantai Kabupaten Sambas 198,76 km, perbatasan negara $\pm$ 97 km; dan perairan laut seluas 1.467,84 Km²



BAB 1 PENDAHULUAN

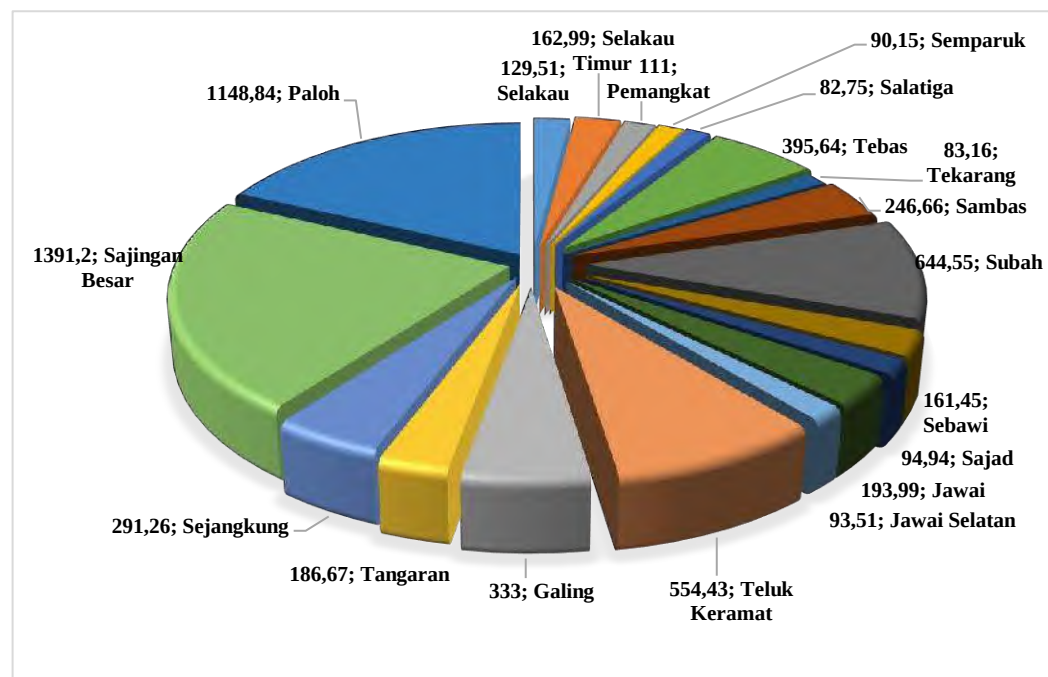
dengan karakteristik sebagian besar adalah pantai berpasir membentang dari Semelagi Besar (Kec. Selakau) hingga Tanjung Datok (Kec. Paloh). Panjang pantai tiap kecamatan menurut Lapan (2003) yaitu: Kecamatan Selakau (13,51 km), Kecamatan Pemangkat (20,49 km), Kecamatan Jawai (42,53 km), Kecamatan Teluk Keramat (19,67 km), Kecamatan Paloh (102,56 km). Luas wilayah laut 12 mil dari darat: 1.467,84 km²

Kabupaten Sambas memiliki 19 kecamatan dan 193 desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sajingan Besar dengan luas 1.391,20 Km² atau 21,75% dari luas Kabupaten Sambas sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Salatiga dengan luas 82,75 Km² atau 1,29% dari luas Kabupaten Sambas.

Luas wilayah Kabupaten Sambas menurut kecamatan (Km²) Tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana grafik berikut ini :

Grafik 1

Luas Kecamatan (Km²) Kabupaten Sambas Tahun 2022



Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2022 (diolah kembali)

1.2.2. Kondisi Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sambas merupakan wilayah relatif datar (kelerengan 0 % - 15 %) dengan luas 468.196 hektar atau 67,59%, dan luas wilayah dengan kelerengan 15% - 40% adalah 160.396 hektar atau 25,08%,



BAB 1 PENDAHULUAN

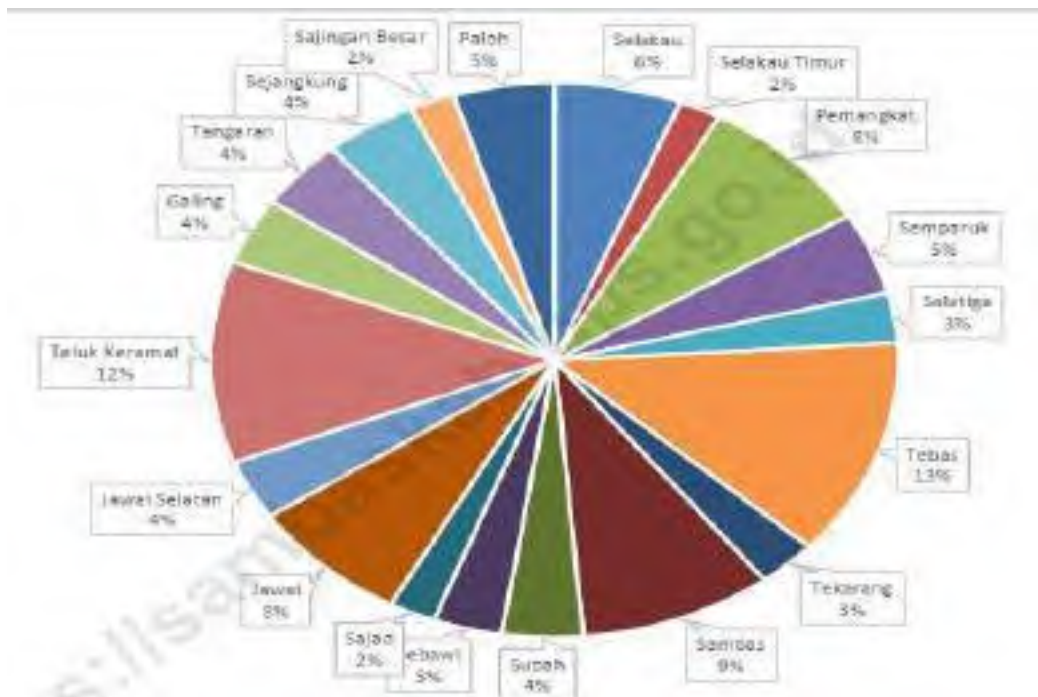
sedangkan kelas lereng > 40% seluas 46.832 hektar atau 7,3%. Ketinggian wilayah berbeda berdasarkan kecamatan. Ketinggian 0-7 m dpl terdapat di Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, Jawai, Paloh dan Teluk Keramat. Ketinggian 8-25 mdpl terdapat di Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, Pemangkat dan Teluk Keramat. Ketinggian 26-100 mdpl terdapat di Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, Pemangkat, Teluk Keramat dan Paloh.

1.2.3. Kondisi Demografis

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan, seperti yang tercantum dalam Program Pembangunan Nasional bahwa manusia Indonesia atau penduduk disebut sebagai modal dasar di samping modal dasar lainnya, apabila mereka dapat dibina dan dikerahkan secara efektif. Namun penduduk juga dapat menjadi beban pembangunan apabila tidak berkualitas, baik kualitas Pendidikan, Kesehatan, mental dan fisik. Oleh karena itu penduduk yang banyak bukan jaminan bagi tercapainya keberhasilan pembangunan.

Grafik 2

Persentase Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas Tahun 2022



Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2023



BAB 1 PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023, penduduk Kabupaten Sambas pada tahun 2022 berjumlah sekitar 647,80 ribu jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 101 jiwa per kilometer persegi atau 3.322 jiwa per desa.

Tabel 1
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sambas Tahun 2022

No.	Kecamatan	Penduduk (ribu)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2022
		2021	2022	
1	Sambas	58,00	59,00	1,60
2	Teluk Keramat	75,10	76,20	1,52
3	Jawai	48,20	49,20	2,17
4	Tebas	81,20	82,50	1,50
5	Pemangkat	53,60	54,10	0,97
6	Sejangkung	27,80	28,20	1,28
7	Selakau	38,20	38,80	1,47
8	Paloh	30,20	30,70	1,42
9	Sajingan Besar	13,50	13,80	2,17
10	Subah	24,20	24,80	2,21
11	Galing	25,20	25,60	1,53
12	Tekarang	17,80	18,20	1,95
13	Semparuk	30,60	31,00	1,57
14	Sajad	13,90	14,20	2,34
15	Sebawi	20,50	20,90	1,78
16	Jawai Selatan	22,40	22,80	1,45
17	Tangaran	26,10	26,50	1,36
18	Salatiga	18,50	18,80	1,40
19	Selakau Timur	12,60	12,80	1,24
Kabupaten Sambas		637,80	647,80	1,57

Sumber :Kabupaten Sambas Dalam Angka tahun 2023



BAB 1 PENDAHULUAN

Dari segi persebaran penduduk antar kecamatan, terdapat perbedaan yang cukup tajam. Kecamatan Pemangkat merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu sekitar 487 jiwa/km². Sebaliknya, Sajingan Besar dengan kepadatan penduduk terkecil hanya dihuni 10 jiwa/km².

Tabel 2

Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sambas Tahun 2022

No.	Kecamatan	Persentase Penduduk		Kepadatan Penduduk per Km ²	
		2021	2022	2021	2022
1	Sambas	9,10	9,10	235	239
2	Teluk Keramat	11,77	11,77	135	137
3	Jawai	7,55	7,60	248	254
4	Tebas	12,73	12,73	205	208
5	Pemangkat	8,40	8,35	483	487
6	Sejangkung	4,36	4,35	95	97
7	Selakau	6,00	5,99	295	300
8	Paloh	4,74	4,73	26	27
9	Sajingan Besar	2,12	2,13	10	10
10	Subah	3,80	3,82	38	38
11	Galing	3,95	3,94	76	77
12	Tekarang	2,79	2,81	214	219
13	Semparuk	4,79	4,79	339	344
14	Sajad	2,18	2,20	147	150
15	Sebawi	3,22	3,23	127	130
16	Jawai Selatan	3,51	3,51	240	243
17	Tangaran	4,09	4,08	140	142
18	Salatiga	2,90	2,90	224	227
19	Selakau Timur	1,98	1,97	77	78
Kabupaten Sambas		100,00	100,00	100	101

Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2023



BAB 1 PENDAHULUAN

1.2.4. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Sambas telah membentuk perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Adapun Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang membawahi 3 (tiga) orang Asisten yaitu:

1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), membawahi dan mengoordinasikan 3 (tiga) bagian yaitu:

- a) Bagian Tata Pemerintahan;
- b) Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
- c) Bagian Hukum.

2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II), membawahi dan mengoordinasikan 3 (tiga) bagian yaitu:

- a) Bagian Perekonomian;
- b) Bagian Administrasi Pembangunan; dan
- c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

3) Asisten Administrasi Umum (Asisten III), membawahi dan mengoordinasikan 4 (empat) bagian yaitu:

- a) Bagian Umum;
- b) Bagian Organisasi;
- c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
- d) Bagian Perencanaan dan Keuangan.

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sambas

c. Inspektorat Kabupaten

d. Dinas-Dinas Daerah



BAB 1 PENDAHULUAN

Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sambas sebanyak 17 (tujuh belas) dinas yang terdiri dari:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan LH;
- 5) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 8) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 9) Dinas Perhubungan;
- 10) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 11) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 12) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
- 13) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
- 14) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- 15) Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 16) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
- 17) Satuan Polisi Pamong Praja.

e. Badan Daerah

Badan – badan Daerah Kabupaten Sambas sebanyak 4 (empat) badan yang terdiri dari:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah;
- 3) Badan Keuangan Daerah;
- 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

f. Kecamatan-Kecamatan

Pemerintah Kabupaten Sambas mempunyai 19 (sembilan belas) Kecamatan yang terdiri dari:

- 1) Kecamatan Selakau;
- 2) Kecamatan Pemangkat;



BAB 1 PENDAHULUAN

- 3) Kecamatan Jawai;
 - 4) Kecamatan Tebas;
 - 5) Kecamatan Sambas;
 - 6) Kecamatan Sejangkung;
 - 7) Kecamatan Teluk Keramat;
 - 8) Kecamatan Paloh;
 - 9) Kecamatan Sajingan Besar;
 - 10) Kecamatan Galing;
 - 11) Kecamatan Subah;
 - 12) Kecamatan Tekarang;
 - 13) Kecamatan Semparuk;
 - 14) Kecamatan Sebawi;
 - 15) Kecamatan Sajad;
 - 16) Kecamatan Jawai Selatan;
 - 17) Kecamatan Tangaran;
 - 18) Kecamatan Selakau Timur; dan
 - 19) Kecamatan Salatiga.
- g) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

1.2.5. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur (SDA) adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan aparatur pemerintah yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan tugas - tugas negara atau pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan yang baik. Keberadaan ASN sebagai modal pokok dalam suatu pemerintahan karena berhasil tidaknya suatu pemerintahan tergantung dari kinerja pegawai yang berkualitas.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sambas berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan dan Golongan Tahun 2022 dapat di lihat sebagaimana tabel berikut ini :



BAB 1 PENDAHULUAN

Tabel 3

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sambas
Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan dan Golongan (orang)
Tahun 2020-2022 (Keadaan Bulan Desember 2022)**

Golongan Ruang	Tahun								
	2020			2021			2022		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Golongan I	12	4	16	11	4	15	10	4	14
Golongan II	450	307	757	417	295	712	361	288	649
Golongan III	1.677	2.038	3.715	1.611	2.022	3.633	1.573	2.040	3.613
Golongan IV	943	806	1.749	853	728	1.581	718	628	1.346
Jumlah	3.082	3.155	6.237	2.892	3.049	5.941	2.662	2.960	5.622

Sumber : BKPSDMAD Kabupaten Sambas Tahun 2022

Tabel 4

**Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sambas
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan (orang)
Tahun 2020-2022**

Tingkat Pendidikan	Tahun								
	2020			2021			2022		
	L	P	L+P	L	P	L+P	PNS	PPPK	TOTAL
SD	17	4	21	13	3	16	12	0	12
SLTP	40	5	45	36	5	41	37	0	37
SLTA	676	338	1.014	585	277	862	710	21	731
D-I	19	36	55	12	18	30	19	0	19
D-II	347	348	695	251	234	485	342	1	343
D-III	288	585	873	288	583	871	892	71	963
D-IV	81	47	128	79	54	133	165	4	169
S-1	1.432	1.718	3.150	1.443	1.797	3.240	3.183	911	4.094
S-2	177	74	251	178	78	256	255	0	255
S-3	5	0	5	7	0	7	7	0	7
Jumlah	3.082	3.155	6.237	2.892	3.049	5.941	5.622	1.008	6.630

Sumber : BKPSDMAD Kabupaten Sambas Tahun 2022

1.2.6. Sumber Daya Keuangan

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk



BAB 1 PENDAHULUAN

segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sambas dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai berikut :

Tabel 5
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	209.294.288.331	209.294.288.331	0	0 %
4.1.01	PAJAK DAERAH	86.239.668.491	86.239.668.491	0	0 %
4.1.02	RETRIBUSI DAERAH	3.863.228.915	3.863.228.915	0	0 %
4.1.03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	3.199.958.784	3.199.958.784	0	0 %
4.1.04	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	115.991.432.141	115.991.432.141	0	0 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.566.575.388.549	1.567.325.588.549	750.000.000	0,05 %
4.2.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.469.410.176.811	1.469.410.176.811	0	0 %
4.2.01.01	DANA PERIMBANGAN	1.283.892.996.811	1.283.892.996.811	0	0 %
4.2.01.01.01	DANA BAGI HASIL	52.151.631.811	52.151.631.811	0	0 %
4.2.01.01.02	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	804.339.073.000	804.339.073.000	0	0 %
4.2.01.01.03	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK	127.230.109.000	127.230.109.000	0	0 %
4.2.01.01.04	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK	300.172.183.000	300.172.183.000	0	0 %
4.2.01.02	DANA INSENTIF DAERAH (DID)	5.151.026.000	5.151.026.000	0	0 %
4.2.01.05	DANA DESA	180.366.154.000	180.366.154.000	0	0 %
4.2.02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	97.165.411.738	97.915.411.738	750.000.000	0,77 %
4.2.02.01	PENDAPATAN BAGI HASIL	84.940.411.738	84.940.411.738	0	0 %
4.2.02.02	BANTUAN KEUANGAN	12.225.000.000	12.975.000.000	750.000.000	6,13 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	40.833.293.500	40.833.293.500	0	0 %
4.3.01	PENDAPATAN HIBAH	40.833.293.500	40.833.293.500	0	0 %
	JUMLAH PENDAPATAN	1.816.702.970.380,00	1.817.453.170.380	750.000.000	0,04 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.411.148.190.298	1.411.698.190.298	550.000.000	0,04 %
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	629.267.845.909	629.264.785.909	(3.060.000)	-0,0005 %
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	667.329.930.560	667.219.930.560	(110.000.000)	-0,02 %
5.1.03	BELANJA BUNGA	2.807.899.269	2.807.899.269	0	0%
5.1.05	BELANJA HIBAH	111.068.114.560	111.731.174.560	663.060.000	0,06 %
5.1.06	BELANJA BANTUAN SOSIAL	674.400.000	674.400.000	0	0%
5.2	BELANJA MODAL	255.188.153.231	255.388.153.231	200.000.000	0,08 %
5.2.01	BELANJA MODAL TANAH	1.853.053.828	1.853.053.828	0	0%
5.2.02	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	66.158.898.798	66.167.398.798	8.500.000	0,01 %
5.2.03	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	56.472.495.446	56.472.495.446	0	0%
5.2.04	BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	125.624.843.659	125.824.843.659	200.000.000	0,16 %
5.2.05	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	5.078.861.500	5.070.361.500	(8.500.000)	-0,17 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.341.464.650	8.341.464.650	0	0%
5.4	BELANJA TRANSFER	268.744.063.820	268.744.063.820	0	0%
5.4.01	BELANJA BAGI HASIL	4342.922404	4342.922404	0	0%



BAB 1 PENDAHULUAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
5.4.02	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	264401.141416	264401.141416	0	0%
	JUMLAH BELANJA	1.943.421.871.999	1.944.171.871.199	750.000.000	0,04 %
	SURPLUS (DEFISIT)	(126.318.701.619)	(126.718.301.619)		
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	279.718.701.619	279.718.701.619	0	0%
6.1.01	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	71.578.701.619	71.578.701.619	0	0%
6.1.04	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	208.140.000.000	208.140.000.000	0	0%
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	153.000.000.000	153.000.000.000	0	0%
6.2.03	PEMBAYARAN CICILAN POKOK UTANG YANG JATUH TEMPO	153.000.000.000	153.000.000.000	0	0%
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	153.000.000.000	153.000.000.000	0	0%
	PEMBIAYAAN NETTO	126.718.701.619	126.718.701.619	0	0%
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	0		

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022

1.3 Permasalahan Utama (*Strategic Issue*)

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/ masyarakat) di masa yang akan datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan sebagai upaya identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kabupaten Sambas. Adapun isu - isu strategis (*Issue Strategic*) Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengalami perlambatan dan semakin diperparah akibat dampak pandemi covid-19;
2. Masih rendahnya infrastruktur dalam kondisi mantap sehingga kurang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kabupaten Sambas;



BAB 1

PENDAHULUAN

3. Tingkat pengangguran terbuka yang cenderung semakin meningkat dan berpotensi semakin parah akibat dampak pandemi covid-19;
4. Jumlah penduduk miskin yang tergolong tinggi dan persentase kemiskinan masih diatas rata-rata provinsi;
5. Pertumbuhan indeks pembangunan manusia yang masih tergolong rendah di Kalimantan Barat;
6. Rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah dan Usia Harapan Hidup masih menjadi permasalahan utama dalam upaya peningkatan IPM;
7. Masih tingginya potensi terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan, aktivitas masyarakat dan akibat dampak bencana alam;
8. Masih tingginya Indeks Resiko Bencana Daerah terutama yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan serta banjir dan kekeringan;
9. Belum optimalnya penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik;
10. Masih tingginya permasalahan sosial dimasyarakat yang mempengaruhi kondisi keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat; dan
11. Belum optimalnya pembangunan di kawasan perbatasan sehingga masih terjadi ketimpangan dengan daerah atau wilayah lainnya.

Memperhatikan isu strategis daerah serta kondisi dampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Sambas, maka tema pembangunan daerah Kabupaten Sambas pada tahun 2022 adalah ***“Pemulihan Ekonomi dan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mewujudkan Kabupaten Sambas yang Maju dan Unggul di Kalimantan Barat”***, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pemulihan ekonomi daerah melalui pemanfaatan SDA berwawasan lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan iklim investasi, peningkatan kesempatan dan perluasan lapangan kerja dalam upaya pengurangan kemiskinan; yang diselaraskan dengan program unggulan KDH terpilih yaitu :
 - a. Program ***Pengembangan OVOP*** (One Village One Product) atau satu desa satu produk unggulan lokal bersinergi dengan investasi;
 - b. Program ***RUSIMAH*** (Pengurusan Ijin di Rumah);
 - c. Program Tema ***SIPINDU*** (Tingkat Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu);



BAB 1

PENDAHULUAN

- d. Program **GREEN GROWTH** (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan).
2. Pemantapan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing; yang diselaraskan dengan program unggulan KDH terpilih yaitu :
 - a. Program **Pelayan Dikatan** (Peningkatan akses layanan Pendidikan dan Kesehatan);
 - b. Program **Pemuda Siap Kerja**
3. Pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah yang mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat, yang diselaraskan dengan program unggulan KDH terpilih yaitu :
 - a. Program PasminumMas (Program Penyediaan Air Bersih dan Air Minum Masyarakat).
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui reformasi birokrasi dan pengembangan inovasi daerah; yang diselaraskan dengan program unggulan KDH terpilih yaitu :
 - a. Program **E-Government**
5. Pemantapan kondisi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat melalui pembinaan kehidupan beragama, peningkatan kesadaran hukum, penanggulangan bencana dan peningkatan wawasan kebangsaan; yang diselaraskan dengan program unggulan KDH terpilih yaitu :
 - a. Program **BENTUK IMAM** (Pembentukan Insan Madani).



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Pemerintah Kab. Sambas

2.1.1. Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk diwujudkan. Untuk menetapkan visi Kabupaten Sambas lima tahun ke depan, jargon yang digunakan adalah “**Sambas Baru, Berkemajuan**”, yang dapat dimaknai dengan pemimpin baru dan semangat baru bersama dan bekerjasama bergerak ke depan untuk lebih unggul. Kata **Berkemajuan** merupakan singkatan dari :

- **Ber** = Beriman kepada Allah SWT
- **Ke** = Kemandirian
- **Maju** = Maju
- **An** = Berkelanjutan

Berdasarkan pertimbangan tersebut serta melihat perkembangan kondisi umum Kabupaten Sambas, maka visi pembangunan Kabupaten Sambas tahun 2021-2026 di bawah kepemimpinan Bupati Sambas H. Satono, S.Sos., I.M.H. dan Wakil Bupati Sambas Fahrur Rofi, S.I.P., M.H.Sc. adalah :

“Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”

Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

- a. **Beriman** adalah kondisi kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, beriman dan bertakwa kepada Allah (Tuhan Yang Maha Esa), senantiasa menghormati dan menjaga nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, serta taat dan tertib hukum termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan (*good and clean government*).
- b. **Kemandirian** adalah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya dari potensi sumber daya dan produksi daerah, yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian,



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

perkebunan, perikanan dan peternakan, peningkatan kontribusi sector industry dan ekonomi rakyat melalui usaha mikro, kecil menengah dan koperasi, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

- c. **Maju** adalah kondisi dimana hasil produksi, investasi, kontribusi industri, dan peranan UMKM dan koperasi dalam perekonomian terus meningkat sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih tinggi dari periode lima tahun sebelumnya (2016-2021). Untuk itu dibutuhkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah.
- d. **Berkelanjutan** adalah suatu kondisi dimana pelaksanaan pembangunan senantiasa menjadi fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi.

2.1.2. Misi

Visi RPJMD Kabupaten Sambas tersebut akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu mewujudkan masyarakat yang taqwa serta taat dan tertib hukum dan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah (*good and clean government*) dan berorientasi pada pelayanan public yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi;
2. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi, yaitu mewujudkan ketersediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar (jalan, jembatan, energi listrik, air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman) untuk mendorong peningkatan kemandirian fiskal, peningkatan desa mandiri, peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta untuk pengembangan ekonomi yang berbasis usaha mikro, kecil menengah, koperasi dan industri;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas melalui peningkatan derajat kesehatan dan



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing;

4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja, yaitu dengan meningkatkan investasi, maka akan mendorong terciptanya lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja sehingga berdampak terhadap berkurangnya angka pengangguran, angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan; dan
5. Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yaitu proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya alam dan lingkungan.

2.1.3. Tujuan:

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang agamis, Bersatu dan berwawasan kebangsaan;
2. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang berbudaya;
3. Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
4. Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah;
5. Meningkatnya penyediaan infrastruktur yang mantap untuk mendorong perekonomian daerah;
6. Meningkatnya status kemajuan desa;
7. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia;
8. Meningkatnya kesempatan kerja;
9. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
10. Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana.



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1.4. Sasaran

Adapun sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, Bersatu dan berwawasan kebangsaan;
2. Terwujudnya kelestarian dan pengembangan budaya daerah;
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
4. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan;
5. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan;
6. Meningkatnya laju PDRB di setiap sektor;
7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah;
8. Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi mantap untuk mendukung perekonomian daerah;
9. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
10. Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia kreatif, inovatif dan berdaya saing;
11. Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS;
12. Tersedianya lapangan pekerjaan melalui pendekatan ekonomi kerakyatan;
13. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
14. Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana.

2.1.5. Strategi

Untuk mencapai visi dan misi yang telah disampaikan di atas, maka strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan Misi Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum dan ketentraman serta ketertiban masyarakat;



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

- b. Peningkatan kerukunan hidup dan rasa wawasan kebangsaan; dan
 - c. Peningkatan pembinaan keagamaan di segala sector kehidupan bermasyarakat;
 - d. Peningkatan pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan budaya lokal;
 - e. Peningkatan koordinasi dan efektivitas penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - f. Peningkatan implementasi rencana kelitbangan dan penerapan inovasi dalam pembangunan daerah;
 - g. Peningkatan komunikasi, informasi dan transparansi pemerintahan;
 - h. Peningkatan tata kelola kearsipan;
 - i. Peningkatan kualitas statistik daerah;
 - j. Peningkatan penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
 - k. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
 - l. Peningkatan dukungan terhadap peningkatan kinerja DPRD;
 - m. Peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan;
 - n. Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang adminduk;
 - o. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - p. Peningkatan persandian;
 - q. Peningkatan pelayanan kepegawaian terhadap ASN;
 - r. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
 - s. Peningkatan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Strategi untuk mewujudkan Misi Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi.
- a. Peningkatan rasio kewirausahaan;
 - b. Peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah;
 - c. Peningkatan persentase koperasi yang berkualitas;
 - d. Peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor jasa administrasi perusahaan dalam perekonomian daerah;



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

- e. Peningkatan kunjungan wisata;
 - f. Peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, perikanan dalam perekonomian daerah;
 - g. Peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dalam perekonomian daerah;
 - h. Peningkatan ketersediaan pangan;
 - i. Peningkatan ketersediaan dan kelayakan infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar dan peningkatan jalan poros desa dalam kondisi mantap;
 - j. Peningkatan ketersediaan dermaga/stegher untuk melayani aksesibilitas orang dan barang;
 - k. Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni;
 - l. Peningkatan jaringan irigasi dalam kondisi baik;
 - m. Peningkatan rumah tangga pengguna air minum;
 - n. Peningkatan rumah tangga bersanitasi layak;
 - o. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - p. Peningkatan status perkembangan satuan pemukiman transmigrasi.
3. Strategi untuk mewujudkan Misi Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
- a. Peningkatan perlindungan terhadap anak;
 - b. Peningkatan akses Pendidikan masyarakat dan peningkatan derajat dan mutu Pendidikan masyarakat;
 - c. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan serta peningkatan kualitas keluarga;
 - d. Peningkatan pembinaan pemuda;
 - e. Peningkatan pembangunan literasi masyarakat;
 - f. Peningkatan pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;
 - g. Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat;
 - h. Peningkatan pembinaan olah raga; dan
 - i. Peningkatan perlindungan dan rehabilitasi sosial.
4. Strategi untuk mewujudkan Misi Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- a. Peningkatan kesempatan kerja.



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

5. Strategi untuk mewujudkan Misi Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
 - a. Peningkatan kualitas lahan;
 - b. Peningkatan kualitas air;
 - c. Peningkatan kualitas udara;
 - d. Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan tata ruang;
 - e. Peningkatan kewaspadaan dini terhadap bencana dan perlindungan terhadap resiko bencana.

2.1.6. Arah Kebijakan

1. Kebijakan untuk mewujudkan Misi Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan:
 - a. Meningkatkan pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan nilai-nilai budaya di masyarakat dalam pemajuan kebudayaan;
 - b. Meningkatkan pembinaan penyuluh agama, tokoh agama, guru ngaji, amil dan lebai, kegiatan keagamaan dan tempat-tempat ibadah serta meningkatkan kerukunan antar umat beragama;
 - c. Meningkatkan kesadaran hukum melalui penyuluhan hukum terpadu serta pembinaan kepada masyarakat dan kelompok keluarga sadar hukum;
 - d. Meningkatkan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan perda dan perkara;
 - e. Meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat;
 - f. Meningkatkan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dan kehidupan politik di masyarakat;
 - g. Meningkatkan koordinasi dan efektivitas penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - h. Meningkatkan dukungan dan fasilitasi terhadap peningkatan kinerja DPRD;
 - i. Meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap ASN;
 - j. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan pelatihan;



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

- k. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
 - l. Meningkatkan efektivitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - m. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang adminduk;
 - n. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pembangunan daerah;
 - o. Meningkatkan penerapan Aplikasi Informatika pada Pemerintah Daerah / e-government;
 - p. Meningkatkan komunikasi, informasi dan transparansi pemerintahan;
 - q. Meningkatkan kualitas statistic daerah;
 - r. Meningkatkan persandian;
 - s. Meningkatkan tata kelola kearsipan dan pengelola arsip;
 - t. Meningkatkan kemanfaatan hasil kelitbangan dan fasilitasi penerapan inovasi bagi pembangunan daerah;
 - u. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman ketertiban dan pelayanan public;
 - v. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - w. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - x. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Kebijakan untuk mewujudkan Misi Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi:
- a. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan industri;
 - b. Meningkatkan pertumbuhan nilai ekspor;
 - c. Peningkatan pertumbuhan omset pedagang pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas;
 - d. Terjaganya stabilitas harga bahan kebutuhan pokok;
 - e. Meningkatkan produktivitas mekanisasi pertanian dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - f. Meningkatkan produksi di bidang kelautan dan perikanan;
 - g. Meningkatkan produksi di sektor peternakan;



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

- h. Meningkatkan daya Tarik destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - i. Meningkatkan kemudahan perizinan dan layanan investasi;
 - j. Meningkatkan investasi, penanaman modal dan kelancaran izin usaha;
 - k. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi;
 - l. Meningkatkan persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha;
 - m. Meningkatkan rasio eirausaha berskala mikro naik kelas;
 - n. Meningkatkan ketersediaan pangan;
 - o. Meningkatkan jalan poros kabupaten dan jalan poros desa dalam kondisi mantap;
 - p. Meningkatkan penataan bangunan Gedung dan lingkungannya;
 - q. Meningkatkan jaringan irigasi dalam kondisi baik;
 - r. Meningkatkan konektivitas, ketertiban dan keamanan di sektor perhubungan;
 - s. Meningkatkan rumah tangga pengguna air minum yang layak;
 - t. Meningkatkan rumah tangga bersanitasi yang layak;
 - u. Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni;
 - v. Meningkatkan komponen dimensi dan peubah satuan pemukiman; dan
 - w. Meningkatkan penataan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Kebijakan untuk mewujudkan Misi Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia:
- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Meningkatkan keterjangkauan dan kemudahan akses Pendidikan;
 - c. Meningkatkan Kesehatan perorangan dan masyarakat;
 - d. Meningkatkan kualitas SDM Kesehatan dan sarpras Kesehatan;
 - e. Meningkatkan budaya literasi masyarakat;
 - f. Meningkatkan prestasi dan daya saing pemuda;
 - g. Meningkatkan pembinaan olahraga;
 - h. Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan;
 - i. Meningkatkan kualitas keluarga;
 - j. Meningkatkan perlindungan terhadap anak;
 - k. Meningkatkan pengendalian penduduk;
 - l. Meningkatkan perlindungan dan rehabilitasi sosial; dan



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

- m. Meningkatkan pemberdayaan sosial.
- 4. Kebijakan untuk mewujudkan Misi Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja:
 - a. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kesempatan kerja; dan
 - b. Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja.
- 5. Kebijakan untuk mewujudkan Misi Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
 - a. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan penanganan pengaduan kualitas air;
 - b. Meningkatkan penanganan sampah perkotaan;
 - c. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan penanganan pengaduan kualitas udara;
 - d. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan Kebun Raya Sambas;
 - e. Meningkatkan sosialisasi kewaspadaan dini dan perlindungan terhadap kebakaran; dan
 - f. Meningkatkan penataan ruang dalam pembangunan daerah.

2.1.7. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Keterkaitan antara visi dan misi, yang ditetapkan dengan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut :



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Tabel 6

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : “*Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan*”.

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
Misi 1 : Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan					
1.	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang berbudaya	1.	Terwujudnya kelestarian dan pengembangan budaya daerah	1.	Peningkatan pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan budaya lokal.
2.	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang agamis, Bersatu dan berwawasan kebangsaan	2.	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, Bersatu dan berwawasan kebangsaan	2.	Peningkatan pembinaan keagamaan di segala sektor kehidupan bermasyarakat;
				3.	Peningkatan kesadaran hukum dan ketentraman serta ketertiban masyarakat;
				4.	Peningkatan kerukunan hidup dan rasa wawasan kebangsaan;
3.	Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	3.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	5.	Peningkatan koordinasi dan efektivitas penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
				6.	Peningkatan dukungan terhadap peningkatan kinerja DPRD;
				7.	Peningkatan pelayanan kepegawaian terhadap ASN;
				8.	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
				9.	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
				10.	Peningkatan kualitas pelayanan public di bidang adminduk;
				11.	Peningkatan penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
				12.	Peningkatan komunikasi, informasi dan transparansi pemerintahan;
				13.	Peningkatan kualitas statistic daerah;
				14.	Peningkatan persandian;
				15.	Peningkatan tata kelola kearsipan;



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

				16.	Peningkatan implementasi rencana kelitbangan dan penerapan inovasi dalam pembangunan daerah;
				17.	Peningkatan kualitas pelayanan public di kecamatan;
		4.	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.	18.	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan; dan
				19.	Peningkatan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Misi 2 : Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi.					
4.	Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah	1.	Meningkatnya laju PDRB di setiap sektor	1.	Peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah;
				2.	Peningkatan laju pertumbuhan PDRB perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dalam perekonomian daerah;
				3.	Peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, perikanan dalam perekonomian daerah;
				4.	Peningkatan kunjungan wisata;
				5.	Peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor jasa administrasi perusahaan dalam perekonomian daerah;
				6.	Peningkatan persentase koperasi yang berkualitas;
				7.	Peningkatan rasio kewirausahaan;
		2.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	8.	Peningkatan ketersediaan pangan;
5.	Meningkatnya penyediaan infrastruktur yang mantap untuk mendorong perekonomian daerah	3.	Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi mantap untuk mendukung perekonomian daerah	9.	Peningkatan ketersediaan dan kelayakan infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar dan peningkatan jalan poros desa dalam kondisi mantap;
				10.	Peningkatan jaringan irigasi dalam kondisi baik;
				11.	Peningkatan ketersediaan dermaga/stegher untuk melayani aksesibilitas orang dan barang;
				12.	Peningkatan rumah tangga pengguna air minum;
				13.	Peningkatan rumah tangga bersanitasi layak;



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

				14.	Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni;
6.	Meningkatnya status kemajuan desa	4.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa	15.	Peningkatan status perkembangan satuan pemukiman transmigrasi;
				16.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa.
Misi 3 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia					
7.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	1.	Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia kreatif, inovatif	1.	Peningkatan akses Pendidikan masyarakat dan peningkatan derajat dan mutu Pendidikan masyarakat;
				2.	Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat;
				3.	Peningkatan pembangunan literasi masyarakat;
				4.	Peningkatan pembinaan pemuda;
				5.	Peningkatan pembinaan olah raga;
				6.	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan serta peningkatan kualitas keluarga;
				7.	Peningkatan perlindungan terhadap anak;
				8.	Peningkatan pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;
		2.	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap PMKS	9.	Peningkatan perlindungan dan rehabilitasi sosial.
Misi 4 : Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja.					
8.	Meningkatnya kesempatan kerja	1.	Tersedianya lapangan pekerjaan melalui pendekatan ekonomi kerakyatan	1.	Peningkatan kesempatan kerja
Misi 5 : Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.					
9.	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.	Peningkatan kualitas air;
				2.	Peningkatan kualitas udara;
				3.	Peningkatan kualitas lahan;
10.	Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana	2.	Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana	4.	Peningkatan kewaspadaan dini terhadap bencana dan perlindungan terhadap resiko bencana;
				5.	Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan tata ruang.



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah perwujudan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang ada. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

Tabel 7
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas
Tahun 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah	1.	Pertumbuhan Ekonomi	3,14
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	2.	Indeks Gini	0,271
		3.	Angka Kemiskinan	7,28
		4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,16
		5.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,65
		6.	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	6,94
		7.	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,17
3.	Meningkatkan kesempatan kerja	8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,34
4.	Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana	9.	Indeks Resiko Bencana	163,59
5.	Meningkatnya Infrastruktur dalam kondisi mantap untuk mendukung perekonomian daerah	10.	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	68,62
		11.	Persentase Jalan Poros Desa Dalam Kondisi Mantap	61,60
		12.	Rasio Jaringan Irigasi	31,20
		13.	Rasio Tersedianya Dermaga/Steher Untuk Melayani Aksesibilitas Orang dan Barang	63,56
		14.	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum	58,78



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

		15.	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	82,66
		16.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	80,29
6.	Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	17.	Indeks Reformasi Birokrasi	BB
		18.	Nilai SAKIP	BB
		19.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP
7.	Meningkatnya status kemajuan desa	20.	Jumlah Desa Mandiri	80
8.	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.	21.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,50%

Jumlah total Anggaran Belanja untuk mencapai keberhasilan Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.130.336.132.559,00



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kab. Sambas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban Tahun Pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sambas periode 2021-2026 atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sambas.

Untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan dan sasaran, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten sambas sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 683/SETDA-OR/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 1026/SETDA-OR/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2022-2026.

Untuk menentukan Capaian kinerja setiap indikator dapat dilihat dengan melakukan pengukuran kinerja yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan dimasa yang akan datang.

Tingkat pencapaian indikator kinerja Tahun 2022, dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 8
Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Indikator	Kategori Capaian
1	Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah	1	Pertumbuhan ekonomi	147,78	Tercapai
2	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	2	Indeks Gini	105,85%	Tercapai
		3	Angka Kemiskinan	105,20 %	Tercapai
		4	Indek Pembangunan Manusia	99,69 %	Tidak tercapai
		5	Harapan Lama Sekolah (HLS)	100,4 %	Tidak tercapai



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

		6	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	97,12 %	Tidak tercapai
		7	Angka Harapan Hidup (AHH)	93,56 %	Tidak tercapai
3	Meningkatnya kesempatan kerja	8	Tingkat Pengangguran Terbuka	65,74 %	Tidak tercapai
4	Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana	9	Indeks Resiko Bencana	105,26	Tercapai
5	Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi mantap untuk mendukung perkeonomian daerah	10	Persentase jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	100,12 %	Tercapai
		11	Persentase Jalan Poros Desa Dalam Kondisi Mantap	110,58 %	Tercapai
		12	Rasio Jaringan Irigasi	101,18 %	Tercapai
		13	Rasio Tersedianya Dermaga/Steher Untuk Melayani Akseibilitas Orang dan Barang	99,07 %	Tidak tercapai
		14	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum	101,24 %	Tercapai
		15	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	100,08 %	Tercapai
		16	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	100,09 %	Tercapai
6	Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	17	Indeks Reformasi Birokrasi	90,48%	Tidak tercapai
		18	Nilai SAKIP	90,97%	Tidak tercapai
		19	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	N/A	N/A
7	Meningkatnya Status Kemajuan Desa	20	Jumlah Desa Mandiri	148,75%	Tercapai
8	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	102,43%	Tercapai

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat rata-rata tingkat capaian kinerja Sasaran Strategis Kabupaten Sambas dengan 8 (delapan) sasaran dan 21 (dua puluh satu) indikator, menunjukkan bahwa **13 (tiga belas) indikator kinerja dengan kategori Tercapai, 7 (tujuh) indikator kinerja dengan kategori Tidak Tercapai, dan 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori N/A.**



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian setiap indikator sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN 1: “Meningkatnya Kemandirian Perekonomian Daerah”

“Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah” merupakan sasaran strategis untuk mencapai misi “Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi”. Tingkat keberhasilan sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas. Untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2022 didukung APBD dengan 34 (tiga puluh empat) program dengan anggaran sebesar Rp 67.671.130.298,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 63.229.056.335,00 atau 93,44 persen dari yang telah dianggarkan.

Adapun capaian indikator kinerja pada Sasaran I dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 9
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pertumbuhan Ekonomi	-	3,14	4,64	147,78

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja pertumbuhan ekonomi telah mencapai target yang telah ditentukan sebesar 3,14 dengan realisasi sebesar 4,64 dengan capaian 147,78 persen dan dikategorikan tercapai.



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mencapai sasaran 1, secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatkannya pertumbuhan ekonomi di kabupaten sambas didukung dengan meningkatnya pertumbuhan PDRB di beberapa sektor antara lain :

a) Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan

Pada tahun 2022 laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan telah mencapai target yang ditentukan sebesar 2 persen dengan realisasi sebesar 4,14 persen dengan capaian kinerja sebesar 207 persen. Laju PDRB sektor industri pengolahan mengalami penurunan dibanding tahun 2021 sebesar 0,77 persen.

b) Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor

Pada tahun 2022 laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor telah mencapai target yang ditentukan sebesar 2,66 persen dengan realisasi sebesar 9,47 persen dengan capaian kinerja sebesar 356,01 persen. Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 6,81persen dari tahun 2021.

c) Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan

Pada tahun 2022 laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan belum mencapai target yang telah ditentukan sebesar 3,90 persen dengan realisasi sebesar 3,15 persen dengan capaian kinerja sebesar 80,76 persen. Salah satu indikator dominasi struktur ekonomi ini adalah besarnya jumlah penduduk Kabupaten Sambas yang bekerja sebagai petani, dari 74,12 persen TPAK Kabupaten Sambas tahun 2022, 57,98 persen adalah pekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan. Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 0,9 point atau 22,22 persen. Penyebab penurunan pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan peternakan antara lain kegiatan alih fungsi lahan pertanian, fluktuasi harga komoditi pertanian yang sangat dinamis, masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani, belum optimalnya pemanfaatan



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

teknologi pertanian, dinamika sulitnya memperoleh pupuk, harga bervariasi serta pengawasan distribusi yang masih lemah..selain itu, faktor yang mendukung pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan adalah meningkatnya produksi perikanan mulai dari perikanan tangkap yang meningkat sebesar 54,72 persen, perikanan budidaya meningkat 71,77 persen dan pengolahan meningkat sebesar 78,97 persen, sedangkan sektor Peternakan mengalami penurunan, hanya mencapai 99,50 persen dari target yang diharapkan, hal ini disebabkan adanya wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang wilayah Indonesia yang berdampak juga di Kabupaten Sambas sehingga berpengaruh kepada lalu lintas ternak yang berdampak langsung pada penurunan produksi daging.

d) Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Pada tahun 2022 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB adalah perbandingan jumlah kontribusi sektor pariwisata (penyediaan akomodasi, makan minum dan jasa lainnya) terhadap total PDB Kabupaten Sambas atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Penyediaan akomodasi dan makan minum adalah sebesar Rp.407.890.000.000,00 ditambah jasa lainnya sebesar Rp.164.650.000.000,00, dibagi total sebesar Rp.22.290.190.000.000,00 dikali 100% Sehingga didapat perhitungan 2,57 persen. Realisasi kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dipengaruhi oleh daya beli masyarakat di sektor jasa akomodasi, hotel, restoran serta jasa lainnya.

e) Laju pertumbuhan PDRB sektor jasa perusahaan

Pada tahun 2022 laju pertumbuhan PDRB sektor jasa perusahaan telah mencapai target 1,5 persen dengan realisasi sebesar 10,33 persen dengan capaian 688,67 persen. Laju pertumbuhan PDRB sektor jasa perusahaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2021 sebesar 10,07 persen. Keberhasilan capaian ini didukung oleh meningkatnya pertumbuhan investasi pada tahun 2022 sebesar 22,34 persen. Nilai investasi Kabupaten Sambas tahun 2022 yaitu PMA Rp. 8.127.113.893.897,00 dan PMDN Rp. 10.299.027.061.963,00 dengan total investasi PMA dan PMDN Rp. 18.426.140.955.860,00. Selain itu, dalam pengurusan perizinan dan non perizinan Pemerintah Kabupaten Sambas telah



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

membuat inovasi dengan istilah “NGUPI BESELAK PAJAM MATE” (NGUrus PerIzinan BisE SEhari LAKak dan daPAat pinJAMan ModAl unTuk usahE)” yang artinya pengurusan perizinan dapat diselesaikan dalam 1 (satu) hari kerja dan berkesempatan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha dari perbankan melalui pogram kredit tanpa jaminan.

f) Persentase koperasi yang berkualitas

pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 25.48 persen dan terealisasi sebesar 24.13 persen dengan capaian kinerja 94.70 persen dan dikategorikan belum tercapai. Belum tercapainya kinerja ini dikarenakan beberapa kondisi yaitu adanya Perubahan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 tentang perizinan usaha simpan pinjam koperasi menjadi Keputusan Menteri Nomor 49 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis resiko usaha simpan pinjam sektor koperasi menghambat pelaksanaan mobilisasi material ke lokasi kegiatan. Selain itu, terbatasnya akses permodalan bagi koperasi dalam pengembangan usaha koperasi yang potensial.

g) Rasio kewirausahaan pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 2.99 persen dan teralisasi sebesar 3.18 persen dengan capaian kinerja 106,11 persen dan dikategorikan tercapai. keberhasilan pencapaian kinerja ini karena telah dilaksanakan kegiatan pelatihan, pendampingan dan sosialisasi secara komprehensif oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas.

Perbandingan target dan capaian kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021-2022, realisasi capaian beberapa tahun terakhir, realisasi capaian kinerja dengan target akhir RPJMD dan target nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 10
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi
Tahun 2021-2022

No	Indikator	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,84	4,37	74,82%	3,14	4,64	147,78%

Sumber: BPS Kabupaten Sambas Tahun 2022



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten sambas mengalami peningkatan dari tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi kabupaten sambas tahun 2021 mencapai 4,37 persen dan selanjutnya naik pada tahun 2022 mencapai 4,64 persen atau tumbuh 0,27 persen dan dikategorikan berhasil.

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Pertumbuhan Ekonomi
Tahun 2019-2022

No	Indikator	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,89	-2,02	4,37	4,64

Sumber: BPS Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten sambas mengalami penurunan 0,25 persen dari tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi kabupaten sambas mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020 sebesar -2,02 persen dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 sebesar 4,37 persen.

Tabel 12
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Kinerja Indikator Pertumbuhan
Ekonomi dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Tahun 2022		Target Akhir RPJMD	Target Nasional
		Target	Realisasi		
1.	Pertumbuhan Ekonomi	3,14	4,64	5,03	5,4 – 6,0

Sumber: Badan Perencanaan Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 baru mencapai 92,25 persen dari target akhir RPJMD. Sedangkan realisasi pertumbuhan ekonomi kabupaten sambas masih lebih rendah dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,4-6,0 persen. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,31 persen.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja pertumbuhan ekonomi antara lain :



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

- a) Melakukan rehabilitasi/revitalisasi pasar dan pembangunan pasar dan membuat zonasi pasar basah berada di bagian depan agar lebih terlihat oleh konsumen dan dapat dianggap berada di tempat yang strategis oleh pedagang.
- b) Peningkatan kapasitas kelembagaan desa, poktan/gapoktan dalam pengelolaan air irigasi, penggunaan pupuk alternatif (hayati, POC dan POG, pelaksanaan PTKJS (Pengelolaan Terpadu Kebun Jeruk Sehat) dan penyediaan prasarana jalan untuk membuka akses pengangkutan hasil-hasil produksi.
- c) Melakukan pencegahan wabah penyakit mulut dan kuku secara berkelanjutan melalui pemberian vaksinasi secara menyeluruh kepada hewan ternak yang ada di kabupaten sambas, khususnya komoditas ternak kambing dan sapi.
- d) Meningkatkan angka kunjungan wisata melalui peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM pariwisata dan peningkatan peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan usaha jasa pariwisata dan pemasaran pariwisata daerah melalui platform digital, penyelenggaraan even pariwisata daerah, peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait, baik dalam penciptaan produk maupun pemasaran pariwisata.
- e) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam perencanaan investasi makro yang berorientasi pada potensi unggulan daerah dan meningkatkan promosi investasi untuk menarik investor baik dalam negeri maupun investor asing melalui sosialisasi tentang prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan.
- f) Melaksanakan sosialisasi Keputusan Menteri Nomor 49 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis resiko usaha simpan pinjam sektor koperasi, melakukan pembinaan melalui pelatihan dan pendampingan koperasi dan memfasilitasi koperasi dalam mengakses permodalan dan secara berkelanjutan tetap melakukan pelatihan/pendampingan kepada UMKM melalui program/kegiatan tahun 2023.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya pada sasaran I dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek pembangunan yang berkelanjutan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	12.311.598.448,00	11.983.699.180,00	97.34
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	12.499.956,00	11.546.134,00	92.37
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	16.999.956,00	16.046.052,00	94.39
		Program Pengembangan Ekspor	77.762.961,00	77.076.041,00	99.12
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.128.964.000,00	2.112.920.330,00	99.25
		Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	299.372.000,00	295.943.223,00	99.85
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	357.213.853,00	356.471.167,00	99.79
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.596.984.054,00	8.577.085.910,00	89.37
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	18.643.174.295,00	18.486.007.218,00	99.16
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	132.841.431,00	131.474.300,00	98.97
		Program Perizinan Usaha Pertanian	149.987.560,00	149.287.802,00	99.53
		Program Penyuluhan Pertanian	9.505.382.419,00	6.846.708.715,00	72.03
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	3.672.005.525,00	3.660.958.971,00	99.70
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.823.551.722,00	2.807.530.155,00	99.43
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	739.612.983,00	734.123.260,00	99.26
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	99.999.674,00	99.983.289,00	99.98
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	252.252.255,00	248.974.779,00	98.70
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	17.873.581,00	17.647.781,00	98.74
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	307.376.265,00	302.884.179,00	98.54
		Program Perizinan Usaha Pertanian	25.752.871,00	25.752.871,00	100
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.113.057.887,00	1.083.650.780,00	97.36
		Program Pemasaran Pariwisata	657.849.259,00	641.760.222,00	97.55
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	126.000.000,00	125.202.000,00	99.37



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	960.738.883,00	916.112.900,00	95.36
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	236.741.087,00	234.452.789,00	99.03
		Program Promosi Penanaman Modal	63.649.415,00	63.667.779,00	99,99
		Program Pelayanan Penanaman Modal	767.774.958,00	762.952.320,00	99.37
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	425.749.000,00	425.248.230,00	99.88
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	150.000.000,00	149.373.400,00	99.58
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	850.070.324,00	819.654.126,00	96,42
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	902.417.509,00	896.712.124,00	99.37
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	59.132.000,00	55.094.977,00	93.17
		Program Pengembangan UMKM	139.780.000,00	139.671.000,00	99.92
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	627.452.000,00	524.485.438,00	83.59
Realisasi Anggaran					93,44
Capaian Kinerja					147,78
Tingkat Efisiensi					54,44

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Mengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sambas, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas Tahun 2022.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 93,44 persen dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 147,78 persen maka pada sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 54,44 persen.

SASARAN 2: “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia”

“Meningkatnya kualitas sumber daya manusia” merupakan sasaran strategis untuk mencapai misi “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.” Tingkat keberhasilan sasaran ini diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Dinas Kesehatan



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Kabupaten Sambas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas. Untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2022 didukung APBD dengan 25 (dua puluh lima) program dengan anggaran sebesar Rp. 414.645.226.060,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 390.782.349.702,00 atau 94,24 persen dari yang telah dianggarkan.

Adapun capaian indikator kinerja pada Sasaran 2 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 14
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Gini	-	0.271	0.256	105,85%
2.	Angka Kemiskinan	-	7,28	6,92	105,20 %
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	68,16	67,95	99,69 %
4.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	-	12,65	12,7	100,40 %
5.	Rata-Rata Lama Sekolah (RTLs)	-	6,94	6,74	97,12 %
6.	Angka Harapan Hidup (AHH)	-	74.17	69,39	93,56 %
Jumlah Rata-rata Perentase Capaian Kinerja Sasaran 2					100,30%

Sumber: BPS Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu angka kemiskinan dengan capaian kinerja 105,20 persen, indeks gini dengan capaian kinerja 105,85 persen dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan capaian kinerja 100,4 persen, dan dikategorikan tercapai Sedangkan indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rata-Rata Lama Sekolah (RTLs) dan Angka Harapan Hidup (AHH) tidak mencapai target yang telah ditentukan dan dikategorikan belum tercapai.

Analisis keberhasilan dan kegagalan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mencapai sasaran 2, secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Gini

Indeks gini pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 0.271 dan terealisasi sebesar 0.256 dengan capaian kinerja sebesar 105,85 persen dan dikategorikan tercapai. Capaian indeks gini Pemerintah Kabupaten sambas lebih rendah



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

dibandingkan dengan indeks gini nasional yaitu 0,381, artinya ketimpangan pendapatan di kabupaten sambas lebih baik dibandingkan dengan tingkat nasional.

Meningkatnya indeks gini di Kabupaten Sambas terjadi karena peningkatan tingkat perlindungan sosial. Tingkat perlindungan sosial di kabupaten sambas pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 80 persen dan terealisasi sebesar 81,27 persen dengan capaian 101,59 persen, hal ini dapat dilihat dari 233.288 jiwa penduduk yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, terdapat 189.601 jiwa yang telah mendapatkan perlindungan sosial dalam bentuk Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Program Keluarga Harapan/PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).

Perbandingan target dan capaian kinerja indeks gini pada tahun 2021-2022, realisasi capaian beberapa tahun terakhir, realisasi capaian kinerja dengan target akhir RPJMD dan target nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 15
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Gini
Tahun 2021-2022

No	Indikator	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Gini	-	-	-	0.271	0.256	105,80 %

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa indeks gini pada tahun 2021 belum menjadi target kinerja pemerintah kabupaten sambas, dan pada Tahun 2022 capaian kinerja indeks gini sebesar 105,80 persen dan dikategorikan berhasil.

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Gini
Tahun 2019-2022

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Gini	-	-	-	0.256

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja indeks gini pada tahun 2019 – 2021 masih belum menjadi target kinerja pemerintah Kabupaten Sambas.



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 17
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Gini
dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Tahun 2022		Target Akhir RPJMD	Target Nasional
		Target	Realisasi		
1.	Indeks Gini	0.271	0.256	0.267	0,376 – 0,378

Sumber: Badan Perencanaan Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja indeks gini pada tahun 2022 telah mencapai target Akhir RPJMD Kabupaten Sambas atau sudah mencapai 104,30 persen. Sedangkan realisasi indeks gini kabupaten sambas lebih baik jika dibandingkan dengan target nasional yaitu 0,376 – 0,378 persen. Pada September tahun 2022 indeks gini nasional mencapai 0,381.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/ hambatan dalam pencapaian kinerja indikator indeks gini antara lain :

- Pembentukan program pembangunan yang menysasar penduduk berpendapatan rendah. Program tersebut adalah program TEMA SIPINDU (Tingkat Ekonomi Masyarakat melalui SIMpan PINjam terpaDU) dan Program Pemuda Siap Kerja. Kedua program tersebut merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sambas yang telah dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sambas.
- Mengoptimalkan verifikasi dan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk memastikan bantuan sosial yang disalurkan baik melalui program Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tepat sasaran.

2. Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin pada Tahun 2022 tercatat sebesar 6,92 persen, menurun 0,74 persen dari Tahun 2021. Artinya, terdapat 6,92 persen penduduk Kabupaten Sambas yang pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sambas Tahun 2022 mencapai 37,65 ribu orang mengalami penurunan 9,25 persen dibandingkan Tahun 2021.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada Tahun 2021–2022, Indeks Kedalaman



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sambas mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sambas pada Tahun 2022 sebesar 0,85, meningkat dibandingkan Tahun 2021 yang sebesar 0,76. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami peningkatan dari 0,14 menjadi 0,16.

Perbandingan target dan capaian kinerja angka kemiskinan pada tahun 2021-2022, realisasi capaian beberapa tahun terakhir, realisasi capaian kinerja dengan target akhir RPJMD dan target nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 18
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Angka Kemiskinan
Tahun 2021-2022

No	Indikator	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Angka Kemiskinan	7,85	7,66	102,48 %	7,28	6,92	105,20 %

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa angka kemiskinan kabupaten sambas mengalami peningkatan capaian dari tahun 2021. Angka kemiskinan kabupaten sambas tahun 2021 mencapai 7,66 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2022 mencapai 6,92 persen atau mengalami peningkatan capaian 0,74 persen dan dikategorikan berhasil.

Tabel 19
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Angka Kemiskinan
Tahun 2019-2022

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1.	Angka Kemiskinan	8,19	7,7	7,66	6.92

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa angka kemiskinan kabupaten sambas mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 angka kemiskinan kabupaten sambas turun sebesar 1,27 persen dari tahun 2019, artinya pemerintah kabupaten sambas berhasil menurunkan angka kemiskinan 0,42 setiap tahunnya dari tahun 2019



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 20
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Angka Kemiskinan dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Tahun 2022		Target Akhir RPJMD	Target Nasional
		Target	Realisasi		
1.	Angka Kemiskinan	7,28	6,92	6,44	8,5 – 9,0

Sumber: Badan Perencanaan Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja angka kemiskinan pada tahun 2022 sudah mencapai 93,06 persen dari target akhir RPJMD. Sedangkan realisasi angka kemiskinan kabupaten sambas lebih baik jika dibandingkan dengan target nasional yaitu 8,5-9,0 persen. Pada tahun 2022 angka kemiskinan nasional mencapai 9,57 persen.

Beberapa kendala/hambatan dalam pencapaian indikator angka kemiskinan Kabupaten Sambas antara lain :

- Pandemi Covid-19 yang berkelanjutan tidak begitu berdampak signifikan pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk masyarakat yang didominasi sektor pertanian (57,11 persen).
- Peningkatan pengeluaran/konsumsi makanan, khususnya pada masa sya'banan (menjelang puasa) dan juga gawai padi.
- Pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial banyak mengalami kendala di lapangan, sehingga masih banyak ditemukan bantuan baik dari pemerintah usat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang dianggap masyarakat kurang tepat sasaran.
- Belum tersedianya rumah singgah atau *shelter* yang layak dan memenuhi standar nasional sebagai tempat sementara bagi orang terlantar, penyandang disabilitas mental terlantar dan PMKS lainnya, sehingga menyulitkan OPD dalam memberikan pelayanan.
- Koordinasi lintas sektoral masih kurang, sehingga penanganan PMKS khususnya ODGJ, OT dan PMT masih belum optimal.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/ hambatan dalam pencapaian kinerja indikator angka kemiskinan antara lain :

- Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin berupa pemberian jaminan kesehatan kepada warga miskin baik yang bersumber dari pemerintah pusat,



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

provinsi maupun pemerintah kabupaten. Pada Tahun 2021, Kabupaten Sambas meluncurkan Program Sehat Satono-Rofi (Prosesar) yaitu pelayanan rawat inap gratis kelas III untuk masyarakat miskin.

- b) Mengoptimalkan verifikasi dan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial untuk memastikan bantuan sosial yang disalurkan baik melalui program Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tepat sasaran.
- c) Menggunakan sumber daya manusia yang berasal dari program kementerian sosial atau relawan tenaga PK, tenaga TKSK Kecamatan, Pekerja Sosial (PSM) dan Taruna Siaga Bencana (TaGaNa) dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Orang Terlantar (OT) dan Pekerja Migran Terlantar (PMT) serta anak bermasalah.

3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sambas pada tahun 2022 mencapai 67,95, meningkat 0,85 poin (1,27 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (67,10). Pembangunan manusia di Kabupaten Sambas terus mengalami kemajuan Selama 2010- 2022, IPM Kabupaten Sambas rata-rata meningkat sebesar 1,07 persen per tahun dari 59,81 pada tahun 2010 menjadi 67,95 pada tahun 2022. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 karena Pandemi COVID-19, peningkatan IPM Kabupaten Sambas sudah kembali membaik pada tahun 2021 dan 2022 seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator konsumsi riil per kapita (yang disesuaikan).

Meningkatkannya indeks pembangunan manusia (IPM) di kabupaten sambas didukung dengan tercapainya beberapa indikator antara lain :

a) Indeks Pembangunan Literasi

Pada tahun 2022 indeks pembangunan literasi kabupaten sambas telah mencapai target yang ditentukan sebesar 35 dan terealisasi sebesar 82,71 dengan capaian kinerja sebesar 236,21 persen. Capaian kinerja indeks pembangunan literasi berdasarkan data dari perpustakaan nasional yang memuat Indeks komponen Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) antara lain pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan ber-SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan anggota perpustakaan.

b) **Tingkat Prestasi Pemuda**

Pada tahun 2022 tingkat prestasi pemuda telah mencapai target yang ditentukan sebesar 3 orang dengan realisasi sebesar 3 orang dengan capaian kinerja sebesar 100 persen. Pemerintah kabupaten sambas telah membina 331 pemuda dan yang telah memberikan prestasi di tingkat Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 3 orang pada tahun 2023 yaitu 1 orang pemuda pelopor di bidang inovasi teknologi dan 2 orang paskibra tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

c) **Tingkat prestasi olahraga**

Pada tahun 2022 tingkat prestasi olahraga telah mencapai target yang ditentukan sebesar 30 prestasi dengan realisasi sebesar 145 prestasi dengan capaian sebesar 483,3 persen. Pada tahun 2022 jumlah perolehan medali kabupaten sambas antara lain 7 medali pada ajang POPDA Tahun 2022, 36 medali pada ajang PORPROV Tahun 2022 dan 2 medali pada ajang Pra POPNAS Tahun 2022.

d) **Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)**

Pada tahun 2022 Indeks Pemberdayaan Gender (IGD) Kabupaten Sambas ditargetkan sebesar 65,26 dan realisasi masih menunggu rilis BPS Kabupaten Sambas.

e) **Capaian Indikator Kabupaten layak Anak**

Pada tahun 2022 capaian indikator kabupaten layak anak telah mencapai target yang ditentukan sebesar 300 dan terealisasi sebesar 336,5 dengan capaian kinerja sebesar 112 persen. Keberhasilan capaian dapat dilihat dari nilai capaian indikator evaluasi kabupaten layak anak disetiap kluster terpenuhi dan melebihi target yang ditetapkan.

f) **Angka Pravelensi Kontrasepsi Modern (mCPR)**

Pada tahun 2022 angka pravelensi kontrasepsi modern (mCPR) telah mencapai target yang ditentukan sebesar 57,9 dan terealisasi sebesar 63,4 dengan capaian kinerja 109 persen. Keberhasilan capaian dapat dilihat dari banyaknya antusias masyarakat yang menggunakan kontrasepsi modern melalui pembentukan kampung KB.



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Perbandingan target dan capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2021-2022, realisasi capaian beberapa tahun terakhir, realisasi capaian kinerja dengan target akhir RPJMD dan target nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 21
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2021-2022

No	Indikator	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,31	67,10	97,96 %	68,16	67,95	99,69 %

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa indeks pembangunan manusia kabupaten sambas mengalami peningkatan capaian. Indeks pembangunan manusia kabupaten sambas tahun 2021 mencapai 67,10 dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 mencapai 67,95 atau mengalami peningkatan capaian 0,85 dan dikategorikan berhasil.

Tabel 22
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019-2022

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,02	67,03	67,10	67,95

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa indeks pembangunan kabupaten sambas mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 indeks pembangunan manusia kabupaten sambas naik sebesar 0,93 dari tahun 2019.

Tabel 23
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Manusia dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Tahun 2022		Target Akhir RPJMD	Target Nasional
		Target	Realisasi		
1.	Indeks pembangunan Manusia	68,16	67,95	70,39	73,44-73,48

Sumber: Badan Perencanaan Kabupaten Sambas Tahun 2022



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja indeks pembangunan manusia pada tahun 2022 baru mencapai 96,53 persen dari target akhir RPJMD. Sedangkan realisasi indeks pembangunan manusia kabupaten sambas lebih rendah jika dibandingkan dengan target nasional yaitu 73,44-73,48 atau baru mencapai 93,53 persen. Pada tahun 2022 angka kemiskinan nasional mencapai 9,57 persen.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja indikator indeks pembangunan manusia antara lain :

- a) Memaksimalkan sosialisasi, publikasi, dan promosi agar keberadaan perpustakaan semakin disadari masyarakat dan menjadi suatu kebutuhan, sehingga akan menjadi prioritas pada perencanaan pembangunan.
- b) Melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bunda literasi dan penggiat Literasi dalam memberikan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perpustakaan dan literasi dan mengadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat/siswa di perpustakaan seperti pelatihan ketrampilan, lomba literasi dan sosialisasi kegemaran membaca.
- c) Meningkatkan dan mengintensifkan pola pembinaan pemuda dan organisasi kepemudaan.
- d) Meningkatkan dan mengintensifkan pola pembinaan atlet melalui memperbanyak even olahraga daerah sehingga memudahkan pencarian bibit unggul atlet prestasi, penyediaan sarana dan prasarana olahraga hingga ke desa-desa dan berkoordinasi dengan organisasi keolahragaan Kabupaten Sambas.
- e) Membentuk gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 800/DP3AP2KB/2017 dan membentuk tim pelaksana kegiatan Kabupaten Layak Anak (KLA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 121/DP3AP2KB/2017. Selain itu dibentuk juga satgas perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PPATBM) di 10 desa dan membentuk puskesmas ramah anak di 14 puskesmas.
- f) Peningkatan pelayanan KB yang dilaksanakan pada masing-masing Desa serta melakukan sosialisasi penggunaan kontrasepsi modern.



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

4. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah merupakan lamanya menempuh sekolah yang dihitung dalam tahun yang ditempuh oleh anak umur tertentu. Harapan lama sekolah Kabupaten tahun 2022 ditargetkan sebesar 13,21 persen dan terealisasi sebesar 12,7 persen dengan capaian kinerja 96,14 persen dan dikategorikan tidak tercapai. Belum tercapainya indikator kinerja ini disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah permasalahan ekonomi dan motivasi keluarga. Masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah cenderung memiliki minat terhadap pendidikan yang rendah. Selain itu tingkat kepercayaan terhadap lembaga pendidikan juga mempengaruhi motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya, terutama untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Perbandingan target dan capaian kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2021-2022, realisasi capaian beberapa tahun terakhir, realisasi capaian kinerja dengan target akhir RPJMD dan target nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 24
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Harapan Lama Sekolah
Tahun 2021-2022

No	Indikator	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,50	12,63	101,04 %	12,65	12,7	100,4 %

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa harapan lama sekolah kabupaten sambas mengalami peningkatan capaian dari tahun 2021 dengan peningkatan capaian sebesar 0.07 dan dikategorikan berhasil.

Tabel 25
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Harapan Lama Sekolah
Tahun 2019-2021

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,52	12,61	12,63	12,7

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2022



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa harapan lama sekolah kabupaten sambas mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 harapan lama sekolah kabupaten sambas sebesar 0,18 dari tahun 2019.

Tabel 26
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Harapan Lama Sekolah dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Tahun 2022		Target Akhir RPJMD	Target Nasional
		Target	Realisasi		
1.	Harapan lama Sekolah (HLS)	12,65	12,7	13,21	Tidak Ada

Sumber: Badan Perencanaan Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja harapan lama sekolah pada tahun 2022 sudah mencapai 96,13 persen dari target akhir RPJMD. Sedangkan tidak terdapat target nasional dalam pencapaian indikator harapan lama sekolah.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja indikator harapan lama sekolah antara lain :

- Memaksimalkan dan melaksanakan efisiensi anggaran pada kegiatan yang menjadi skala prioritas dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi baik internal maupun eksternal dalam rangka peningkatan derajat dan kualitas Pendidikan masyarakat.
- Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yaitu sosialisasi minat belajar di PAUD, sosialisasi wajib belajar 12 tahun, pengadaan taman baca untuk meningkatkan minat baca anak dan melakukan pemberian bimbingan belajar.

5. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RTLS) tahun 2022 ditargetkan sebesar 6,94 persen dan terealisasi sebesar 6,74 persen dengan capaian kinerja 97,12 persen dan dikategorikan tidak tercapai. rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,02 tahun, dari 6,72 tahun menjadi 6,74 tahun pada tahun 2022. Pada tahun 2022 jumlah anak usia 7-18 tahun yang putus atau tidak melanjutkan Pendidikan ke jenjang Pendidikan formal tahun 2022 berjumlah 1.281 orang dengan rincian 473 abak putus sekolah/tidak tamat jenjang SD dan 808 orang anak putus sekolah/tidak tamat jenjang SMP.



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Belum tercapainya indikator ini disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah tingkat perekonomian masyarakat yang masih rendah dengan rata-rata penduduk kabupaten sambas adalah bekerja sebagai petani dan menjadi tenaga kerja indonesi di Malaysia, jarak sekolah yang jauh, ketersediaan layanan Pendidikan yaitu sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan mutu Pendidikan dan persepsi masyarakat masih rendah terhadap pentingnya pendidikan serta masih rendahnya mootivasi belajar anak.

Perbandingan target dan capaian kinerja Rata -Rata Lama Sekolah (RTLS) pada tahun 2021-2022, realisasi capaian beberapa tahun terakhir, realisasi capaian kinerja dengan target akhir RPJMD dan target nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 27
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2021-2022

No	Indikator	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Rata-Rata Lama Sekolah (RTLS)	7,3	6,72	92,05 %	6,94	6,74	97,12 %

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah kabupaten sambas mengalami peningkatan capaian realisasi. Rata-rata lama sekolah kabupaten sambas tahun 2021 mencapai 6,72 dan naik pada tahun 2022 mencapai 6,74 atau mengalami peningkatan capaian 0.02 dan dikategorikan berhasil.

Tabel 28
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2019-2022

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1.	Rata-Rata Lama Sekolah (RTLS)	6,68	6,71	6,72	6,74

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah kabupaten sambas mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 rata-rata lama sekolah kabupaten sambas naik sebesar 0,06 dari tahun 2019.



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 29
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Rata-Rata Lama Sekolah dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Tahun 2022		Target Akhir RPJMD	Target Nasional
		Target	Realisasi		
1.	Rata-Rata Lama Sekolah (RTLS)	6,94	6,74	7,41	Tidak Ada

Sumber: Badan Perencanaan Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 baru mencapai 90,96 persen dari target akhir RPJMD. Sedangkan tidak terdapat target nasional dalam pencapaian indikator rata-rata lama sekolah.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja indikator rata-rata lama sekolah antara lain :

- Memberikan subsidi bantuan kepada anak yang berasal dari keluarga mampu.
- Memprioritaskan anggaran pada pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
- Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yaitu akan pentingnya Pendidikan di era globalisasi dan pemberian penghargaan bagi kecamatan yang cukup berhasil dalam menutaskan program wajib Pendidikan dasar.

6. Angka Harapan Hidup (AHH)

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 69,39 tahun, lebih lama 0,31 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022 capaian kinerja pada indikator Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu sebesar 93,56% dan dikategorikan tidak tercapai. Belum tercapainya kinerja ini dikarenakan beberapa kondisi antara lain belum terakomodirnya anggaran DAU untuk pemenuhan SPM bidang kesehatan, masih sulitnya akses menuju layanan kesehatan di beberapa tempat terpencil, beberapa jenis tenaga kesehatan masih belum tercukupi di beberapa fasilitas kesehatan dan masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung di beberapa fasilitas kesehatan.

Perbandingan target dan capaian kinerja Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 2021-2022, realisasi capaian beberapa tahun terakhir, realisasi capaian



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

kinerja dengan target akhir RPJMD dan target nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 30
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Angka Harapan Hidup
Tahun 2021-2022

No	Indikator	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,82	69,08	97,54 %	74.17	69,39	93,56 %

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa angka harapan hidup kabupaten sambas mengalami peningkatan capaian realisasi. Angka harapan hidup kabupaten sambas tahun 2021 mencapai 69,08 dan naik pada tahun 2022 mencapai 69,39 atau mengalami peningkatan capaian 0.31 dan dikategorikan berhasil.

Tabel 31
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Angka Harapan Hidup
Tahun 2019-2022

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1.	Angka Harapan Hidup (AHH)	68,83	68,93	69,08	69,39

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa angka harapan hidup kabupaten sambas mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 angka harapan hidup kabupaten sambas naik sebesar 0,56 dari tahun 2019

Tabel 32
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Angka Harapan Hidup dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Tahun 2022		Target Akhir RPJMD	Target Nasional
		Target	Realisasi		
1.	Angka Harapan Hidup (AHH)	74.17	69,39	74,84	Tidak Ada

Sumber: Badan Perencanaan Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja angka harapan hidup pada tahun 2022 baru mencapai 92,72 persen dari target akhir RPJMD. Sedangkan tidak terdapat target nasional dalam pencapaian indikator angka harapan hidup.



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja indikator angka harapan hidup antara lain :

- Meningkatkan pelayanan kesehatan pada daerah terpencil dengan melakukan pengadaan ambulan desa dan bantuan operasional logistic ke poskesdes.
- Peningkatan sumber daya manusia melalui cakupan puskesmas yang memiliki 5 (lima) tenaga strategis kesehatan, dan peningkatan upaya promosi kesehatan melalui cakupan desa siaga aktif, UKBM dan Germas.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 2 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 33
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	130.563.963,00	129.646.864,00	99,30
		Program Rehabilitasi Sosial	335.602.659,00	329.808.512,00	98,27
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	262.332.893,00	259.135.290,00	98,78
		Program Penanganan Bencana	128.784.824,00	122.645.800,00	95,09
		Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan	77.958.987,00	77.874.899,00	99,89
		Program Pemberdayaan Sosial	39.999.153,00	39.678.645,00	99,20
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	4.015.758.254,00	3.891.502.750,00	96,91
		Program Pengelolaan Pendidikan	161.504.344.486,00	149.518.945.433,00	95,28
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	209.410.960.603,00	199.803.733.944,66	95,41
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	2.478.827.743,00	2.435.942.925,00	98,27
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	445.836.337,00	425.678.000,00	95,48
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	948.506.265,00	934.265.345,00	98,50
		Program Pembinaan Perpustakaan	7.618.432.037,00	7.572.484.618,00	99,40
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	77.256.342,00	76.221.115,00	98,66
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.249.041.654,00	1.243.917.165,00	99,59
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	247.000.000,00	243.825.200,00	98,71



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	12.233.806.724,00	12.184.037.250,00	99.59
		Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	499.999.167,00	497.821.289,00	99.56
		Program Perlindungan Perempuan	295.000.442,00	294.999.869,00	99.99
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	715.588.509,00	713.459.124,00	99.70
		Program Pemenuhan Hak Anak	865.688.664,00	858.438.600,00	99.16
		Program Perlindungan Khusus Anak	739.310.497,00	738.646.208,00	99.91
		Program Pengendalian Penduduk	599.594.399,00	599.582.622,00	99.99
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.397.336.595,00	6.371.621.722,00	99.60
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.327.694.863,00	1.418.616.512,00	42.63
Realisasi Anggaran					94,24
Capaian Kinerja					99,59
Tingkat Efisiensi					5,35

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sambas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 94,24 persen dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 99,59 persen maka pada sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,35 persen.

SASARAN 3: “Meningkatnya Kesempatan Kerja”

“Meningkatnya kesempatan kerja” merupakan sasaran strategis untuk mencapai misi “Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja”. Tingkat keberhasilan sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas. Untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2022 didukung APBD dengan 3 (tiga) program dengan anggaran sebesar Rp 10.960.222.509,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 10.944.581.968,00 atau 99.86 persen dari anggarannya.



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Adapun capaian indikator kinerja pada Sasaran 3 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 34
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	-	3,34	5,08	65,74

Sumber: BPS Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator tingkat pengangguran terbuka belum mencapai target yang telah ditentukan sebesar 3,34 dengan realisasi sebesar 5,08 dengan capaian 65,74 persen dan dikategorikan tidak tercapai.

Analisis keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mencapai sasaran 3, secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

1. Tingkat Pengangguran terbuka

Tingkat Pengangguran terbuka pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 3,34 dan terealisasi sebesar 5,08 dengan capain kinerja sebesar 65.74 persen dan dikategorikan belum tercapai. pada Tahun 2022, TPT laki-laki sebesar 6,14 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,70 persen. TPT menurut kategori pendidikan Pada Tahun 2022, TPT dari lulusan Sekolah Menengah atas merupakan yang paling tinggi dibandingkan lulusan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 9,56 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah angkatan kerja dengan pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 2,83 persen.

Indikator tingkat pengangguran terbuka bertujuan untuk mengukur peningkatan kesempatan kerja yang dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berdasarkan data BPS Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2022 sebesar 74,12 persen, naik 1,28 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 72,84 persen. Peningkatan TPAK dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja dan angkatan kerja. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Sambas. Penduduk usia kerja tahun 2022 sebanyak 402.146 orang, naik sebanyak 3.682 orang dibanding tahun 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 298.061 orang (74,12 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Komposisi



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

angkatan kerja pada tahun 2022 terdiri dari 282.918 ribu orang penduduk yang bekerja dan 15.143 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021, terjadi kenaikan jumlah angkatan kerja sebanyak 7,28 ribu orang. Apabila dibandingkan dengan target TPAK yaitu ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 74,65 persen, maka TPAK tahun 2022 hanya mencapai 99,29 persen.

Selain itu, meningkatnya pengangguran terbuka disebabkan covid-19. Pada Tahun 2022 terdapat 1.103 orang (0,27 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19, yang seluruhnya merupakan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19.

Perbandingan target dan capaian kinerja tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021-2022, realisasi capaian beberapa tahun terakhir, realisasi capaian kinerja dengan target akhir RPJMD dan target nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 35
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021-2022

No	Indikator	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,32	3,97	83,63	3,34	5,08	65,74

Sumber: BPS Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja tingkat pengangguran terbuka Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 17,89 persen jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021. Penurunan disebabkan meningkatnya tingkat pengangguran di kabupaten sambas sebesar 1,11 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 36
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2022

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,58	3,71	3,97	5,08

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2022



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sambas mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,50 persen dari tahun 2019.

Tabel 37
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Tahun 2022		Target Akhir RPJMD	Target Nasional
		Target	Realisasi		
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,34	5,08	2,60	6,24-5,52

Sumber: BPS Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 baru mencapai 51,18 persen dari target akhir RPJMD. Sedangkan realisasi tingkat pengangguran terbuka kabupaten sambas lebih baik jika dibandingkan dengan target nasional yaitu 6,24-5,52 persen. Pada September tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka nasional mencapai 5,86 persen.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja tingkat pengangguran terbuka antara lain :

- Meningkatkan kualitas angkatan kerja dengan memberikan keterampilan/skill yang dibutuhkan dunia kerja dan Meningkatkan akses pencari kerja terhadap informasi kesempatan kerja sehingga dapat Meningkatkan produktivitas tenaga kerja pemerintah Kabupaten Sambas.
- Memberikan pemahaman kepada pengusaha dan pekerja/buruh dengan sosialisasi Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama, serta mengenai sarana hubungan industrial yang lainnya juga untuk pemahaman perselisihan hubungan industrial.
- Melakukan usulan anggaran untuk rehabilitasi/revitalisasi pasar dan pembangunan.
- Meningkatkan investasi pemerintah kabupaten sambas melalui Kerjasama dengan beberapa investor sehingga dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat yang dapat menurunkan angka pengangguran.



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 3 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 38
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	8.684.996.808,00	8.674.059.754,00	99,87
		Program Penempatan Tenaga Kerja	1.766.790.151,00	1.764.194.444.,00	99,85
		Program Hubungan Industrial	5.08.435.550,00	506.327.770,00	95,59
Realiasi Anggaran					99,86
Capaian Kinerja					65,74
Tingkat Efisiensi					-34,12

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,86 persen dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 65,74 persen, maka pada sasaran ini tidak terdapat efisiensi.

SASARAN 4

“Meningkatnya Pengelolaan dan Perlindungan Terhadap Bencana”

“Meningkatnya Pengelolaan dan Perlindungan Terhadap Bencana” merupakan sasaran strategis untuk mencapai misi “*mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.*” Tingkat keberhasilan sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas. Untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2022 didukung APBD dengan 3 (tiga) program dengan anggaran sebesar Rp 1.516.470.049,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 1.515.132.198,00 atau 99,91 persen dari anggarannya.



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Adapun capaian indikator kinerja pada Sasaran 4 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 39
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Resiko Bencana	-	163,59	155,41	105,26

Sumber: Buku IRBI Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator Indeks Resiko Bencana telah mencapai target yang telah ditentukan sebesar 163,59 dengan realisasi sebesar 155,41 dengan capaian 105,26 persen dan dikategorikan tercapai.

Analisis keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mencapai sasaran 4, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Resiko Bencana

Indeks Risiko Bencana bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana, perhitungan tingkat risiko dilakukan dengan memperhatikan faktor *hazard*, *vulnerability*, dan *capacity*. Indeks Risiko Bencana ini merupakan penilaian berdasarkan risiko bencana yang ada.

Indikator indeks risiko bencana bertujuan untuk mengukur indeks ketahanan daerah dan kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW. Pengukuran sebagaimana dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut :

a) Indeks ketahanan daerah (IKD)

Pada tahun 2022 Indeks ketahanan daerah belum mencapai target yang ditentukan sebesar 0,59 dengan realisasi sebesar 0,52 dengan capaian kinerja sebesar 88,14 persen.

b) Kesesuaian pemanfaatan tata ruang.

Pada Tahun 2022, kesesuaian pemanfaatan tata ruang tahun 2022 telah mencapai target yang ditentukan sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar 100 persen dengan capaian kinerja 100 persen. kesesuaian pemanfaatan tata ruang dihitung dengan perbandingan antara perizinan yang dibolehkan sesuai pemanfaatan tata ruang dan perizinan yang masuk. Pada tahun 2022 terdapat 400 perizinan yang masuk dan telah sesuai dengan pemanfaatan tata ruang.



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Perbandingan target dan capaian kinerja indeks resiko bencana pada tahun 2021-2022, realisasi capaian beberapa tahun terakhir, realisasi capaian kinerja dengan target akhir RPJMD dan target nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 40
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Resiko Bencana Tahun 2021-2022

No	Indikator	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Resiko Bencana	-	172,20	-	163,59	155,41	105,26

Sumber: Buku IRBI Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa indeks resiko bencana pada tahun 2021 belum menjadi target kinerja pemerintah kabupaten sambas, akan tetapi berdasarkan rilis dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) indeks resiko bencana kabupaten sambas mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 16,79.

Tabel 41
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Resiko Bencana Tahun 2019-2022

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Resiko Bencana	172,20	172,20	172,50	155,41

Sumber: Buku IRBI Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat indeks resiko bencana di Kabupaten Sambas dari tahun 2019-2021 stagnan pada nilai 172,20 dan mengalami penurunan sebesar 16,79 pada tahun 2022.

Tabel 42
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Resiko Bencana dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Tahun 2022		Target Akhir RPJMD	Target Nasional
		Target	Realisasi		
1.	Indeks Resiko Bencana	163,59	155,41	139,05	Tidak Ada

Sumber: Badan Perencanaan Kabupaten Sambas Tahun 2022



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja indeks resiko bencana kabupaten sambas pada tahun 2022 baru mencapai 89,47 persen dari target akhir RPJMD. Sedangkan tidak terdapat target nasional dalam pencapaian indikator indeks resiko bencana. Pada tahun 2022 realisasi Indeks resiko bencana kabupaten sambas lebih rendah jika dibandingkan dengan target nasional yaitu 134,16 persen.

Beberapa kendala/hambatan dalam pencapaian indikator indeks resiko bencana Kabupaten Sambas antara lain :

- Struktur tanah di kabupaten sambas merupakan tanah gambut sehingga sering menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Selain itu banyaknya hutan yang telah gundul menyebabkan terjadinya banjir di beberapa Kawasan di Kabupaten Sambas.
- Sistem OSS sebagai digitalisasi perizinan dan non perizinan masih terdapat tumpang tindih kewenangan dan jangka waktu yang singkat dalam pendftaran ijin berusaha kewalahan dalam verifikasi lapangan.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja indikator indeks resiko bencana antara lain :

- Melaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka langsung kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana
- menetapkan 15 (lima belas) desa yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
- Melaksanakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian ATR/BPN terkait perizinan pemanfaatan tata ruang.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 4 dapat di lihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 43
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 4

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	Meningkatnya Pengelolaan dan Perlindungan Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	736.093.481,00	735,454,462,00	99.91
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	585.983.254,00	585.983.254	100



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	194.393.314,00	193.694.482,00,00	99,64
Realisasi Anggaran					99,91
Capaian Kinerja					105,26
Tingkat Efisiensi					5,35

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Sambas dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas

Berdasarkan tabel tersebut di atas, apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,91 persen dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 105,26 persen, maka pada sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,35 persen.

SASARAN 5

“Meningkatnya Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap Untuk Mendukung Perekonomian Daerah”

“Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi mantap untuk mendukung perekonomian daerah” merupakan sasaran strategis untuk mencapai misi “Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan local dan investasi.” Tingkat keberhasilan sasaran ini diukur dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas, Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas. Untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2020 didukung APBD dengan 14 (empat belas) program dengan anggaran sebesar Rp. 344.579.482.147,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 286.754.194.231,00 atau 83,22 persen dari yang telah dianggarkan.

Adapun capaian indikator kinerja pada Sasaran 4 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 44
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	%	68,62	68,70	100,12
2.	Persentase Jalan Poros Desa Dalam Kondisi Mantap	%	61,60	68,12	110,58
3.	Rasio Jaringan Irigasi	%	31,20	31,57	101,18
4.	Rasio Tersedianya Dermaga / Steher Untuk Melayani Akseibilitas Orang dan Barang	%	63,56	62,97	99,07
5.	Persentase Rumah Tangga yang menempati Hunian dengan Akses Air Minum	%	58,78	59,51	101,24
6.	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	%	82,66	82,73	100,08
7.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	80,39	80,46	100,09
Jumlah Rata-rata Perentase Capaian Kinerja Sasaran 5					101,76

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap, persentase jalan poros desa dalam kondisi mantap, rasio jaringan irigasi, persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum, persentase rumah tangga bersanitasi, cakupan ketersediaan rumah layak huni dan dikategorikan tercapai. Sedangkan indikator kinerja rasio tersedianya dermaga / steher untuk melayani akseibilitas orang dan barang belum mencapai target yang telah ditentukan dan dikategorikan belum tercapai.

Analisis keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mencapai sasaran 5, secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

Jalan Kabupaten dalam Kondisi mantap adalah jalan kondisi jalan kabupaten dalam keadaan baik ditambah jalan kabupaten keadaan sedang. Indikator persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 68,62 dan dapat terealisasi sebesar 68,70% dengan capaian kinerja sebesar 100,12 dan dikategorikan tercapai. Dikarenakan adanya perubahan panjang jalan



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

kabupaten yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 723/PUPR/2022 tanggal 20 Oktober 2022, Panjang seluruh jalan kabupaten sambas menjadi 901,397 km dari 1.102,206 km. Pada tahun 2022 panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 619,294 km dari panjang seluruh jalan kabupaten 901,397 atau 68,70%.

Perbandingan target dan capaian kinerja persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2021-2022, realisasi capaian beberapa tahun terakhir, realisasi capaian kinerja dengan target akhir RPJMD dan target nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 45
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap Tahun 2021-2022

No	Indikator	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	66,07	66,12	100,08	68,62	68,70	100,12

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap mengalami peningkatan capaian realisasi. persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap tahun 2021 mencapai 66,12 persen dan naik pada tahun 2022 mencapai 68,70 persen atau mengalami peningkatan capaian 2,58 persen dan dikategorikan berhasil.

Tabel 46
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap Tahun 2019-2022

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	52,67	58,03	66,12	68,70

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap mengalami peningkatan setiap tahunnya. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap mengalami peningkatan sebesar 16,03 dari tahun 2019.



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 47
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Tahun 2022		Target Akhir RPJMD	Target Nasional
		Target	Realisasi		
1.	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	68,62	68,70	78,78	Tidak Ada

Sumber: Badan Perencanaan Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2022 baru mencapai 87,20 persen dari target akhir RPJMD. Sedangkan tidak terdapat target nasional dalam pencapaian indikator persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap antara lain :

- keterbatasan dana yang tersedia sehingga tidak dapat membangun semua ruas jalan telah ditargetkan.
- Factor cuaca menjadi penghambat dalam mobilisasi material ke lokasi kegiatan dan ketersediaan material yang dibutuhkan masih menjadi kendala dalam pembangunan jalan.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan dalam pencapaian indikator persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah dengan memprioritas dana yang tersedia untuk pembangunan jalan kabupaten yang menjadi skala prioritas yang telah ditetapkan dan mempercepat pelaksanaan kegiatan agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai rencana dan tepat waktu.

2. Persentase Jalan Poros Desa Dalam Kondisi Mantap

Jalan poros desa dalam Kondisi mantap adalah jalan kondisi jalan poros desa dalam keadaan baik ditambah jalan poros desa keadaan sedang. Indikator persentase jalan poros desa dalam kondisi mantap pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 60,61 persen dan dapat terealisasi sebesar 68,12 persen dengan capaian kinerja sebesar 110,58 persen dan dikategorikan tercapai. Pada tahun 2022 jalan poros desa dalam kondisi mantap sepanjang 612,161 km dari panjang seluruh jalan poros desa di Kabupaten Sambas 898,626 km atau 68,12 persen.



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Perbandingan target dan capaian persentase jalan poros desa dalam kondisi mantap pada tahun 2021-2022, realisasi capaian beberapa tahun terakhir, realisasi capaian kinerja dengan target akhir RPJMD dan target nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 48
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Jalan Poros Desa Dalam Kondisi Mantap Tahun 2021-2022

No	Indikator	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Persentase Jalan Poros Desa Dalam Kondisi Mantap	71	78,37	110,38	61,60	68,12	110,58

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa persentase jalan poros desa dalam kondisi mantap mengalami penurunan capaian realisasi. persentase jalan poros desa dalam kondisi mantap tahun 2021 mencapai 78,37 persen dan turun pada tahun 2022 mencapai 68,12 persen atau mengalami penurunan capaian 10,25 persen dan dikategorikan tidak berhasil.

Tabel 49
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Jalan Poros Desa Dalam Kondisi Mantap Tahun 2021-2022 Tahun 2019-2022

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
2.	Persentase Jalan Poros Desa Dalam Kondisi Mantap	63,72	76,69	78,37	68,12

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada Persentase jalan poros desa dalam kondisi mantap pada tahun 2019-2021 mengalami peningkatan dan turun sebesar 10,25 persen tahun 2022.

Tabel 50
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Jalan Poros Desa Dalam Kondisi Mantap dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Tahun 2022		Target Akhir RPJMD	Target Nasional
		Target	Realisasi		
1.	Persentase Jalan Poros Desa Dalam Kondisi Mantap	61,60	68,12	68,50	Tidak Ada

Sumber: Badan Perencanaan Kabupaten Sambas Tahun 2022



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase jalan poros desa dalam kondisi mantap pada tahun 2022 baru mencapai 99,44 persen dari target akhir RPJMD. Sedangkan tidak terdapat target nasional dalam pencapaian indikator persentase jalan poros desa dalam kondisi mantap.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja persentase jalan poros desa dalam kondisi mantap adalah keterbatasan dana membuat tidak semua ruas jalan desa sepanjang 898,626 km dapat ditangani sesuai kebutuhan dan target yang telah direncanakan dan sebagian besar ruas-ruas jalan desa sudah melampaui umur rencana dan penanganannya terbatas pada pemeliharaan. Selain itu, faktor cuaca menjadi penghambat mobilisasi material ke lokasi kegiatan sehingga beberapa pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur pedesaan mengalami keterlambatan.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja indikator persentase jalan poros desa dalam kondisi mantap, antara lain :

- a) Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dalam pembangunan jalan desa, sehingga target pembangunan jalan poros desa dapat terlaksana melalui dana desa.
- b) Memprioritaskan dana yang tersedia untuk penanganan jalan poros desa yang terhubung dengan jalan kabupaten dengan menyusun skala prioritas.
- c) mempercepat pelaksanaan kegiatan agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai rencana dan tepat waktu.

3. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan antara jumlah panjang saluran primer, saluran sekunder dan saluran sub sekunder dalam kondisi baik dengan luas wilayah yang dilayani. Jaringan irigasi dalam kondisi baik tahun 2022 ditargetkan 31,20% dan dapat terealisasi sebesar 31,57% dengan capaian kinerja sebesar 101,18% dan dikategorikan tercapai. Pada tahun 2022 jaringan irigasi yang telah dibangun sepanjang 2.297.493,78 m dari seluruh jaringan irigasi yang harus ditangani sepanjang 7.253.187,26.

Perbandingan target dan capaian rasio jaringan irigasi pada tahun 2021-2022, realisasi capaian beberapa tahun terakhir, realisasi capaian kinerja dengan target akhir RPJMD dan target nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 51
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Rasio Jaringan Irigasi
Tahun 2021-2022

No	Indikator	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Rasio Jaringan Irigasi	31,02	31,36	101,09	31,20	31,57	101,18

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa rasio jaringan irigasi mengalami peningkatan capaian realisasi. Rasio jaringan irigasi tahun 2021 mencapai 31,36 persen dan naik pada tahun 2022 mencapai 31,57 persen atau mengalami peningkatan capaian 0,21 persen dan dikategorikan berhasil.

Tabel 52
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Rasio Jaringan Irigasi
Tahun 2019-2022

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1.	Rasio Jaringan Irigasi	-	31,11	31,36	31,57

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada rasio jaringan irigasi mengalami peningkatan sebesar 0,46 persen dibandingkan tahun 2020.

Tabel 53
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Rasio Jaringan Irigasi
dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Tahun 2022		Target Akhir RPJMD	Target Nasional
		Target	Realisasi		
1.	Rasio Jaringan Irigasi	31,20	31,57	32	Tidak Ada

Sumber: Badan Perencanaan Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi rasio jaringan irigasi pada tahun 2022 baru mencapai 98,66 persen dari target akhir RPJMD. Sedangkan tidak terdapat target nasional dalam pencapaian indikator rasio jaringan irigasi.



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja rasio jaringan irigasi antara lain :

- a) keterbatasan dana yang tidak sebanding dengan Panjang jaringan irigasi/rawa yang akan ditangani.
- b) Terjadinya alih fungsi lahan daerah irigasi/rawa.
- c) Sruktur tanah yang lunak menghambat pembangunan jaringan irigasi.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja rasio jaringan irigasi adalah dengan memprioritas dana yang tersedia untuk pembangunan irigasi yang menjadi skala prioritas yang telah ditetapkan dan peningkatan kapasitas SDM uang berkompeten.

4. Rasio Tersedianya Dermaga/Steher untuk Melayani Aksebilitas Orang dan Barang

Rasio tersedianya dermaga /steher untuk melayani aksebilitas orang dan barang pada tahun 2022 belum mencapai target yang ditentukan sebesar 63,56 persen daan teralisasi sebesar 62,97 persen dengan capaian kinerja 99,07 persen. Belum tercapainya indikator kinerja ini disebabkan karena pada tahun 2022 jumlah dermaga/steher yang akan dibangun sebanyak 324 dermaga/steher dan hanya terealisasi sebanyak 321 dermaga/steher dengan dermaga/steher yang dibangun pada tahun 2022 sebanya 9 buah.

Perbandingan target dan capaian rasio tersedianya dermaga/steher untuk melayani aksebilitas orang dan barang pada tahun 2021-2022, realisasi capaian beberapa tahun terakhir, realisasi capaian kinerja dengan target akhir RPJMD dan target nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 54
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Rasio Tersedianya Dermaga/Steher untuk Melayani Aksebilitas Orang dan Barang Tahun 2021-2022

No	Indikator	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
4.	Rasio Tersedianya Dermaga / Steher Untuk Melayani Aksebilitas Orang dan Barang	-	-	-	63,56	62,97	99,07

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas Tahun 2022



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa rasio dermaga/steher untuk melayani aksebilitas orang dan barang pada tahun 2021 belum menjadi target kinerja pemerintah kabupaten sambas, dan pada Tahun 2022 capaian kinerja dermaga/steher untuk melayani aksebilitas orang dan barang sebesar 99,07 persen dan dikategorikan tidak berhasil.

Tabel 55
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Rasio Tersedianya Dermaga/Steher untuk Melayani Aksebilitas Orang dan Barang Tahun 2019-2022

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1.	Rasio Tersedianya Dermaga / Steher Untuk Melayani Aksebilitas Orang dan Barang	-	-	-	62,97

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja rasio dermaga/steher untuk melayani aksebilitas orang dan barang pada tahun 2019-2021 masih belum menjadi target kinerja pemerintah Kabupaten Sambas.

Tabel 56
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Rasio Tersedianya Dermaga/Steher untuk Melayani Aksebilitas Orang dan Barang dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Tahun 2022		Target Akhir RPJMD	Target Nasional
		Target	Realisasi		
1.	Rasio Tersedianya Dermaga / Steher Untuk Melayani Aksebilitas Orang dan Barang	63,56	62,97	71,51	Tidak Ada

Sumber: Badan Perencanaan Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi rasio dermaga/steher untuk melayani aksebilitas orang dan barang pada tahun 2022 baru mencapai 88,06 persen dari target akhir RPJMD. Sedangkan tidak terdapat target nasional dalam pencapaian indikator rasio dermaga/steher untuk melayani aksebilitas orang dan barang.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja rasio tersedianya dermaga/steher untuk melayani aksebilitas orang dan barang adalah Sebagian daerah yang menghubungkan antar desa maupun antar kecamatan di



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Kabupaten Sambas melalui angkutan sungai, namun ketersediaan dermaga yang belum memadai menjadi penghambat untuk distribusi barang maupun angkutan orang. masih banyaknya dermaga/steigher yang mengalami kerusakan diakibatkan masih lemahnya pemeliharaan terhadap dermaga/steigher yang telah dibangun.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja indikator rasio tersedianya dermaga/steher untuk melayani aksesibilitas orang dan barang, antara lain :

- a) Melakukan dan meningkatkan monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam penganggaran untuk memprioritaskan pada kegiatan yang menjadi indikator kinerja dalam pencapaian sasaran strategis.
- b) Rehabilitasi atau pemeliharaan Dermaga/Steigher sebagai langkah konsistensi mendukung aksesibilitas orang dan barang

5. Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum

Indikator persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 58,78% dan dapat terealisasi sebesar 59,51% dengan capaian kinerja sebesar 101,24%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pada tahun ini telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Perbandingan target dan capaian persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak pada tahun 2021-2022, realisasi capaian beberapa tahun terakhir, realisasi capaian kinerja dengan target akhir RPJMD dan target nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 57
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Tahun 2021-2022

No	Indikator	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Persentase Rumah Tangga yang menempati Hunian dengan Akses Air Minum	75	55,33	73,77	58,78	59,51	101,24

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan LH Kabupaten Sambas Tahun 2022



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak mengalami peningkatan capaian realisasi. persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak tahun 2021 mencapai 55,33 persen dan naik pada tahun 2022 mencapai 59,51 persen atau mengalami peningkatan capaian 4,18 persen dan dikategorikan berhasil.

Tabel 58
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Tahun 2019-2022

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Rumah Tangga yang menempati Hunian dengan Akses Air Minum	-	61,30	55,33	59,51

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan LH Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak mengalami penurunan capaian sebesar 1,79 persen dibandingkan tahun 2020.

Tabel 59
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Tahun 2022		Target Akhir RPJMD	Target Nasional
		Target	Realisasi		
1.	Persentase Rumah Tangga yang menempati Hunian dengan Akses Air Minum	58,78	59,51	72,74	100

Sumber: Badan Perencanaan Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi bahwa persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak pada tahun 2022 baru mencapai 81,81 persen dari target akhir RPJMD dan 59,51 persen dari target nasional.



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sehingga belum tercapainya standar pelayanan minimal secara nasional adalah penambahan penduduk yang tidak diikuti oleh penambahan anggaran yang memadai, penyebaran penduduk yang tidak merata, luasnya wilayah yang ditangani dan kurangnya tenaga teknis serta masyarakat kabupaten sambas masih menggunakan air hujan sebagai bahan air minum. Dalam penyerapan anggaran, terjadi kendala pada beberapa kegiatan dalam hal pencairan dana dari kas daerah Kabupaten Sambas, sehingga walaupun pekerjaan fisik telah mencapai 100%, namun pembayaran belum mencapai 100%.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak antara lain :

- a) Untuk mengejar ketertinggalan dalam pencapaian standar pelayanan minimal air bersih yang ditargetkan secara nasional melalui perencanaan penyediaan air bersih berdasarkan permintaan masyarakat melalui penambahan anggaran biaya baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, subsidi dari APBD Provinsi maupun APBN.
- b) Melakukan pembangunan sarana penyaringan air bersih, karena masyarakat Kabupaten Sambas masih menggunakan air hujan sebagai konsumsi air minum.

6. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Indikator persentase rumah tangga bersanitasi pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 82,66 persen dan dapat terealisasi sebesar 82,73 persen dengan capaian kinerja sebesar 100,08 persen. Secara kualitas rumah tinggal tersanitasi yang layak pada tahun 2021 sampai dengan 2022 hanya mencapai 81,93 persen dan 18,07 persen rumah tinggal tidak memiliki akses sanitasi atau buang air besar sembarangan (BABS) ditambah terdapat 11,08 persen berpotensi mencemari lingkungan dan badan air.

Perbandingan target dan capaian persentase rumah tangga bersanitasi pada tahun 2021-2022, realisasi capaian beberapa tahun terakhir, realisasi capaian kinerja dengan target akhir RPJMD dan target nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 60
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2021-2022

No	Indikator	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	61,65	81,93	133,22	82,66	82,73	100,08

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan LH Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa persentase rumah tangga bersanitasi mengalami peningkatan capaian realisasi. Persentase rumah tangga bersanitasi tahun 2021 mencapai 81,93 persen dan naik pada tahun 2022 mencapai 82,73 persen atau mengalami peningkatan capaian 0,8 persen dan dikategorikan berhasil.

Tabel 61
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2019-2022

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	90,45	92,56	81,93	82,73

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan LH Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada Persentase rumah tangga bersanitasi mengalami penurunan capaian sebesar 7,72 persen dibandingkan tahun 2019.

Tabel 62
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Rumah Tangga Bersanitasi dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Tahun 2022		Target Akhir RPJMD	Target Nasional
		Target	Realisasi		
1.	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	82,66	82,73	95.58	100

Sumber: Badan Perencanaan Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi bahwa persentase rumah tangga bersanitasi pada tahun 2022 baru mencapai 86,56 persen dari target akhir RPJMD dan 82,73 persen dari target nasional.



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Hambatan/Kendala yang dihadapi dalam peningkatan indikator persentase rumah tinggal bersanitasi adalah masih ada masyarakat di daerah perkotaan yang menggunakan WC cubluk/tidak septik, sehingga masih dikategorikan “tidak layak”. Selain itu masih banyak perumahan yang tidak mempunyai drainase.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja persentase rumah tinggal bersanitasi antara lain :

- mengoptimalkan anggaran DAU untuk program/kegiatan peningkatan persentase rumah tangga bersanitasi dan mengusulkan program/kegiatan sanitasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yaitu SANIMAS.
- Membangun Sarana sanitasi yang dibangun berupa tangki septik individual skala perdesaan dan unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala permukiman.

7. Cakupan Ketersediaan Rumah Tidak Layak Huni

Indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 80,39 persen dan dapat terealisasi sebesar 80,46 persen dengan capaian kinerja sebesar 100,09 persen. Hal ini menunjukkan kondisi rumah masyarakat yang tidak layak huni telah tertangani sesuai target. Walaupun demikian, masih banyak rumah layak huni yang belum tertangani di Kabupaten Sambas, sehingga diperlukan peningkatan target di tahun 2023.

Perbandingan target dan capaian cakupan ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2021-2022, realisasi capaian beberapa tahun terakhir, realisasi capaian kinerja dengan target akhir RPJMD dan target nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 63
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021-2022

No	Indikator	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	85	80.24	94,40	80,39	80,46	100,09

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan LH Kabupaten Sambas Tahun 2022



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa cakupan ketersediaan rumah layak huni mengalami peningkatan capaian realisasi. Cakupan ketersediaan rumah layak huni tahun 2021 mencapai 80,24 persen dan naik pada tahun 2022 mencapai 80,46 persen atau mengalami peningkatan capaian 0,22 persen dan dikategorikan berhasil.

Tabel 64
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2019-2022

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	-	79,12	80,24	80,46

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan LH Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada cakupan ketersediaan rumah layak huni mengalami peningkatan capaian sebesar 1,34 persen dibandingkan tahun 2019.

Tabel 65
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Tidak Layak Huni dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Tahun 2022		Target Akhir RPJMD	Target Nasional
		Target	Realisasi		
1.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	80,39	80,46	80,50	100

Sumber: Badan Perencanaan Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi persentase rumah tangga bersanitasi pada tahun 2022 baru mencapai 99,95 persen dari target akhir RPJMD dan 80,46 persen dari target nasional.

Hambatan/Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator persentase rumah layak huni, yaitu masih banyaknya penduduk kabupaten sambas yang masih memiliki rumah tidak layak huni sedangkan pendanaan baik dari dana DAU ataupun DAK/APBN masih belum memenuhi target program rumah layak huni.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja yaitu dengan Mengupayakan/menambah sharing pembiayaan dari Pemerintah Daerah untuk Program Rumah Layak Huni.



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 5 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 66
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 5

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi mantap untuk mendukung perekonomian daerah	Program Penyelenggaraan Jalan	160.073.544.220,00	130.667.573.434,00	81,63
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	345.388.466,00	273.816.650	79,28
		Program Penataan Bangunan Gedung	12.597.398.503,00	8.901.957.150	70,67
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	6.517.362.771,00	4.870.157.000,00	74,73
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	45.588.208.873,00	40.079.664.588,00	82,49
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	33.198.249.040,00	32.991.563.039,00	99,38
		Program Pengelolaan Pelayaran	1.778.508.712,00	1.764.813.288,00	99,23
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	20.489.233.218,00	17.856.829.772,00	87,15
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.087.129.686,00	5.599.150.151,00	91,98
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	11.986.523.243,00	8.705.532.449.	72,63
		Program Pengembangan Permukiman	41.562.050.143,00	33.979.303.179	81,76
		Program Pengembangan Perumahan	691.001.957,00	648.056.444,00	93,79
		Program Kawasan Permukiman	253.883.182,00	203.662.987,00	8.,22
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	411.000.133,00	212.114.100,00	51,61
Realisasi Anggaran					83,22
Capaian Kinerja					101,76
Tingkat Efisiensi					18,54

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 83,22 persen dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 101,76 persen, maka pada sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 18,54 persen.



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

SASARAN 6

“Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”

“Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)” merupakan sasaran strategis untuk mencapai misi “meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Tingkat keberhasilan sasaran ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sambas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sambas, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, Inspektorat Kabupaten Sambas, dan Kantor Camat Kabupaten Sambas. Untuk mewujudkan sasaran tersebut terlaksana melalui pelaksanaan 26 (dua puluh enam) program yang didukung dana APBD tahun 2021 sebesar Rp 367.349.136.225,00 yang telah terealisasi sebesar Rp 356.027.359.546,00 atau 96,92 persen dari pagu anggarannya.

Adapun capaian indikator kinerja pada Sasaran 6 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 67
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai SAKIP	-	70 (BB)	63,34 (B)	90,48%
2	Indeks Reformasi Birokrasi	-	80 (BB)	63,68 (B)	90,97%
3	Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemda	-	WTP	N/A	N/A
Jumlah Rata-rata Persentase Capaian Sasaran 6					N/A

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sambas dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja nilai saki dan indeks reformasi birokrasi belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu mendapat predikat “BB” dengan realisasi mendapat predikat “B” dan dikategorikan Tidak Tercapai. sedangkan hasil capaian opini BPK terhadap laporan keuangan pemda masih dalam proses evaluasi.

Analisis keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mencapai sasaran 6, secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud untuk mengukur kinerja yang bertujuan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2022 ditargetkan dengan nilai sebesar 70 atau Predikat “BB” dan terealisasi dengan nilai 63,34 dengan predikat B dan dikategorikan belum tercapai.

Perbandingan target dan capaian nilai saki pada tahun 2021-2022, realisasi capaian beberapa tahun terakhir, realisasi capaian kinerja dengan target akhir RPJMD dan target nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 68
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Nilai SAKIP
Tahun 2021-2022

No	Indikator	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Nilai SAKIP	70 (B)	61.32 (B)	87,6%	70 (BB)	63,34 (B)	90,48%

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja nilai saki mengalami peningkatan dari tahun 2021. Nilai SAKIP Kabupaten Sambas mengalami peningkatan sebesar 2,02 dan mendapat predikat “B” tahun 2021-2022.

Tabel 69
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai SAKIP
Tahun 2019-2022

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1.	Nilai SAKIP	60,14	60,90	61,32	63,34

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sambas Tahun 2022



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada nilai SAKIP mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nilai sakip mengalami peningkatan sebesar 3,2 dari tahun 2019 dan mendapat predikat “B” dari tahun 2019-2021.

Tabel 70
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai SAKIP
dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Tahun 2022		Target Akhir RPJMD	Target Nasional
		Target	Realisasi		
1.	Nilai SAKIP	70 (BB)	63,3 (B)	70 (BB)	Tidak Ada

Sumber: Badan Perencanaan Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi nilai SAKIP pada tahun 2022 baru mencapai 90,42 persen dari target akhir RPJMD dan tidak terdapat target nasional dalam pencapaian nilai SAKIP Kabupaten Sambas.

Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi terhadap implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas. hasil evaluasi didapat bebrapa rekomendasi anata lain :

- Melakukan Reviu dan perbaiki dokumen perencanaan kinerja pemda dan PD untuk memastikan sasaran strategis telah berorientasi outcome dan sesuai dengan level jabatan yang mengawal kinerja tersebut. Selain itu, memastikan antar dokumen perencanaan kinerja (RPJMD/Renstra, PK, IKU) Pemda dengan PD telah selaras.
- Melakukan reviu dan penyempurnaan kualitas indikator kinerja level pemda hingga ke seluruh PD, untuk memastikan indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk menggambarkan sasaran strategisnya.
- Menyempurnakan pohon kinerja PD yang telah disusun menyesuaikan dengan kaidah penyusunan pohon kinerja yang ada di dalam Peraturan Menteri PANRB No. 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja. Pohon kinerja PD diharapkan mampu menjabarkan kinerja strategis (ultimate outcome) ke dalam CSF dan setiap tingkatan kinerja dengan baik, memenuhi unsur logis (sebab-akibat) dan mampu menyajikan alternatif-alternatif kinerja yang beragam serta efektif mendorong tercapainya kinerja utama PD.



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

- d) endorong komitmen pimpinan PD dan pegawai untuk memanfaatkan aplikasi pengukuran dan pengumpulan data kinerja dengan melakukan pengisian data kinerja tepat waktu ke dalam aplikasi e-SAKIP.
- e) Melakukan perbaikan kualitas E-SAKIP yang sudah ada dengan memastikan pengisian dalam aplikasi tidak hanya upload dokumen saja, tetapi dapat melakukan pengisian dan pemutakhiran data secara langsung dalam aplikasi sehingga data kinerja yang diinput adalah terbaru. aplikasi e-SAKIP yang dimiliki agar diintegrasikan dengan sistem perencanaan, sistem keuangan, dan sistem pengukuran kinerja individu yang sudah dimiliki sebelumnya.
- f) Mendorong pemanfaatan informasi dan laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya, khususnya terkait informasi realisasi kinerja, sebagai dasar dalam penetapan target kinerja
- g) Menyempurnakan laporan kinerja dengan menambahkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, target jangka menengah, standar nasional, dan analisis efisiensi anggaran yang menyertakan informasi perbandingan serapan anggaran dengan realisasi kinerja untuk diketahui apakah penyerapan anggaran berbanding lurus dengan capaian kinerja
- h) Menyusun pedoman evaluasi AKIP internal yang sifatnya lebih teknis yang mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kemudian memanfaatkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi AKIP kepada seluruh PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
- i) Meningkatkan kualitas evaluasi AKIP internal diantaranya dengan memperluas aspek yang dievaluasi, termasuk mengoreksi kualitas pohon kinerja dan perjenjangan kinerja hingga unit terkecil PD, dan memperdalam analisis sehingga hasil akhir penilaian dapat menggambarkan kondisi riil implementasi SAKIP di setiap PD.
- j) Merumuskan mekanisme monitoring yang efektif untuk memastikan setiap PD menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan di dalam LHE AKIP internal.



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja indikator nilai SAKIP antara lain :

- a) Telah meningkatkan pemahaman terkait SAKIP terutama pada level pimpinan dan telah dilakukan perbaikan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah disusun sehingga mempunyai legalitas dan dapat digunakan sebagai rujukan perencanaan, penanggaran dan penyelarasan dokumen perencanaan tingkat Kabupaten dan tingkat PD melalui kegiatan Asistensi/Penguatan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas yang dilaksanakan di Hotel Ibis.
- b) Telah dilakukan perjenjangan kinerja melalui penyusunan Pohon Kinerja sehingga dapat dipastikan bahwa setiap level organisasi dan pegawai memiliki kontribusi hasil secara berjenjang dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- c) Pemerintah Kabupaten Sambas telah membuat aplikasi e-SAKIP Kabupaten Sambas dan telah mengembangkan aplikasi e-sakip sambas sebagai aplikasi evaluasi kinerja pemerintah kabupaten sambas.\
- d) Menyusun laporan kinerja yang memperbandingkan antara realisasi dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir, target akhir RPJMD dan target nasional.
- e) Menyusun peraturan Bupati Sambas tentang pedoman evaluasi internal.
- f) Melakukan pendampingan dalam penyusunan pohon kinerja dan cascading sehingga terdapat keselarasan antara dokumen RPJMD dengan Renstra PD.

2. Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2022 ditargetkan nilai sebesar 70 atau Predikat “BB” dan terealisasi sebesar 63,68 atau predikat “B” dengan capaian kinerja sebesar 90,97 persen. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengukuran sebagaimana dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) Tingkat Efektivitas Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah
Tingkat efektivitas koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah ditargetkan sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar 119,05 persen dengan capaian kinerja sebesar 109,15 persen.



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

b) Tingkat Dukungan Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD

Tingkat dukungan pelayanan tugas dan fungsi DPRD ditargetkan sebesar 92 persen dengan realisasi sebesar 93 persen dengan capaian kinerja sebesar 101,08 persen. keberhasilan ini didukung melalui komunikasi yang intensif dan efektif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan, ANggota dan Alat Kelengkapan DPRD.

c) Indeks Penerapan Sistem Merit

Sistem Merit adalah kebijakan dalam manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Terdapat beberapa Aspek yang menjadi kriteria Penilaian Mandiri Sistem merit pada Aplikasi SIPINTER, yakni mulai dari Perencanaan Kebutuhan Pegawai, pengadaan, pembinaan Karir dan Peningkatan Kompetensi, mutasi, Rotasi dan Promosi, pengelolaan Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, perlindungan serta sistem Pendukung. pada tahun 2022, ndeks sistem merit ditargetkan sebesar 250 dengan realisasi sebesar 277,5 dengan capaian kinerja sebesar 123 persen.

d) SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja

SAKIP komponen perencanaan kinerja ditargetkan sebesar 21,24 persen dengan capaian kinerja 21.26 persen dengan capaian kinerja 100,09 persen. keberhasilan ini didukung dengan telah menyusun dokumen perencanaan kinerja mencakup RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam Renstra dan PK dan dokumen lainnya di tingkat perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Sambas juga telah melakukan perbaikan dokumen PK Bupati tahun 2022, dari sebelumnya berisi kinerja tujuan RPJMD kemudian diperbaiki dengan mengakomodir sasaran strategis.

e) Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Adminduk

Indeks kepuasan masyarakat pelayanan adminduk pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 84,20 persen dan teralisasi sebesar 84,25 persen dengan capaian kinerja 100,05 persen. Pada tahun 2022 hasil survey kepuasan masyarakat Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapat mutu pelayanan “B” dengan nilai rata-rata IKM 3,370.



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

f) Tingkat Pengelolaan SPBE

Tingkat pengelolaan SPBE pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 65 persen dan terealisasi sebesar 65 persen dengan capaian kinerja 100 persen. Keberhasilan ini didukung dengan di terbitkan Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupate Sambas.

g) Tingkat Keterbukaan Informasi Publik

Tingkat keterbukaan informasi publik pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 90 persen dan terealisasi sebesar 133 persen dengan capaian kinerja 148 persen. keberhasilan ini didukung dengan telah dibentuk PPID pada perangkat daerah dan Desa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Saat Ini terdapat 23 Perangkat Daerah, 18 Kecamatan, 1 RSUD, dan 105 Desa yang telah Membentuk PPID Pelaksana.

h) Cakupan Data Statistik OPD

Cakupan data statistik OPD pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar 100 persen dengan capaian kinerja 100 persen. keberhasilan ini didukung dengan penggunaan data statistik untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi dan atau penyusunan kebijakan telah dilakukan oleh seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sambas melalui dokumen RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021–2026.

i) Tingkat Keamanan Cyber Daerah

Tingkat keamanan cyber daerah pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 36 persen dan terealisasi sebesar 33,5 persen dengan capaian kinerja 93,18 persen. kegagalan pencapaian ini disebabkan layanan email Sanapati sudah dilakukan pada semua perangkat daerah, namun surat/berita yang masuk hanya tertuju kepada 93,18 persen perangkat daerah yang ada, sehingga tidak semua perangkat daerah mendapat surat dari email Sanapati.

j) Tingkat Pengelolaan Arsip

Tingkat pengelolaan arsip pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 55 dan terealisasi sebesar 58,56 persen dengan capaian kinerja 106,47 persen. keberhasilan capaian kinerja ini di dukung Berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 465



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala ANRI Nomor 458 Tahun 2022 Tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2022 dimana Kabupaten Sambas memperoleh nilai 58,56 dengan kategori CC (cukup) dengan nomor urut 139 dari 508 kabupaten/kota se Indonesia dan nomor urut 1 di Propinsi Kalimantan Barat.

k) Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Persentase implementasi rencana kelitbangan pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100 dan terealisasi sebesar 100 persen dengan capaian kinerja 100 persen. Keberhasilan pencapaian ini merupakan kerja sama tim dan koordinasi yang baik antar pihak terkait sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Partisipasi aktif unsur kelitbangan PD, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Masyarakat serta stakeholder yang terkait dengan Bidang Litbang.

l) Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 61,00 kategori “sangat Inovatif” dan terealisasi sebesar 47,80 persen kategori “inovatif” dengan capaian kinerja 78,36 persen. belum tercapainya kinerja ini disebabkan belum optimalnya pengisian data karena skornya masih di kategori inovatif sehingga perlu sosialisasi dan pendampingan dalam penginputan data kesistem termasuk kelengkapan data dukung dan pembinaan yang lebih aktif terhadap pengembangan inovasi di Kabupaten Sambas. Namun disisi lain, pada tahun 2022, Kabupaten Sambas berhasil mempertahankan gelar sebagai Kabupaten Perbatasan TERINOVATIF dan menempati Peringkat ke 3 Se Indonesia dan diterima langsung oleh Bupati Sambas.

Perbandingan target dan capaian indeks reformasi birokrasi pada tahun 2021-2022, realisasi capaian beberapa tahun terakhir, realisasi capaian kinerja dengan target akhir RPJMD dan target nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 71
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi
Tahun 2021-2022

No	Indikator	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	70 (BB)	60,86 (B)	86,94%	70 (BB)	63,68 (B)	90,97%

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja indeks reformasi birokrasi mengalami peningkatan dari tahun 2021. Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Sambas mengalami peningkatan sebesar 2,82 dan mendapat predikat “B” tahun 2021-2022.

Tabel 72
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Reformasi Birokrasi
Tahun 2019-2022

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	60.02	60.11	60.86	63,68

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada indeks reformasi birokrasi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Indeks reformasi birokrasi mengalami peningkatan sebesar 3,66 dari tahun 2019 dan mendapat predikat “B” dari tahun 2019-2021.

Tabel 73
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Reformasi Birokrasi
dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Tahun 2022		Target Akhir RPJMD	Target Nasional
		Target	Realisasi		
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	70 (BB)	63,68 (B)	70 (BB)	Tidak Ada

Sumber: Badan Perencanaan Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi indeks reformasi birokrasi pada tahun 2022 baru mencapai 90,97 persen dari target akhir RPJMD dan tidak terdapat target nasional dalam pencapaian indeks reformasi birokrasi Kabupaten Sambas.



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja indikator indeks reformasi birokrasi antara lain:

- a) Melakukan koordinasi maksimal dengan berbagai sumber daya yang ada secara efektif dan efisien dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah.
- b) Meningkatkan kualitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat DPRD Dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung kerja DPRD.
- c) Dalam perencanaan kebutuhan pegawai, Pemerintah Kabupaten Sambas telah menyusun usulan sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan beberapa aspek yakni aspek anjab dan analisis beban kerja, mutasi masuk keluar dan jumlah PNS yang akan pensiun.
- d) Melaksanakan asesment terhadap 30 Orang Pejabat Eselon II dan 151 orang Pejabat Eselon III sebagai pemetaan kompetensi PNS.
- e) Melaksanakan pemberian penghargaan kepada PNS yang dianggap memiliki kinerja baik, dalam bentuk PNS Teladan dan Satya Lencana bagi PNS dan Penegakan hukuman disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran mulai tingkat rendah, sedang dan berat.
- f) Mempercepat waktu pelayanan dan meningkatkan pengetahuan, keahlian pelaksanaan pelayanan / petugas.
- g) Menyempurnakan perjanjian kinerja bupati sambas, pohon kinerja pemerintah kabupaten sambas dan cascading RPJMD serta melaksanakan pendampingan kepada perangkat daerah dalam penyusunan pohon kinerja, cascading kinerja dan perjanjian kinerja perangkat daerah.
- h) Peningkatan Pengelolaan SPBE melalui penyusunan regulasi terkait SPBE dengan melibatkan unsur terkait sehingga regulasi tersebut mencakup seluruh urusan layanan SPBE pemerintah daerah, dan komitmen pimpinan dalam mendukung terlaksananya tatakelola SPBE pemerintah Daerah.
- i) Menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Nomor 144/Diskominfo/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi serta Tim Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas sebagai bentuk komitmen pimpinan dalam mendukung keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sambas. Selain



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

itu juga melakukan koordinasi dan pembinaan secara berkala untuk mendorong pembentukan PPID Pelaksana OPD maupun PPID Desa sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Untuk mendukung edukasi terkait implementasi KIP, Diskominfo juga mengadakan sosialisasi dan literasi melalui media informasi sebagai upaya meningkatkan peranan PPID di Kabupaten Sambas. Untuk memudahkan proses pelayanan informasi kepada masyarakat maka Diskominfo mempunyai Website PPID serta aplikasi pelayanan informasi online.

- j) Melaksanakan lokakarya rencana aksi satu data Kabupaten Sambas (4 kali pertemuan) yang merupakan kerjasama Pemerintah Kabupaten Sambas dengan USAID ERAT dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Sambas yang bertujuan untuk melihat tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan statistik sektoral.
- k) Meningkatkan dan mendorong agar semua perangkat daerah telah mendapatkan keamanan informasi daerah melalui email sanapati.
- l) Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi yang baik dengan unsur kelitbang OPD, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Masyarakat serta stakholder yang terkait dengan bidang litbang sehingga penelitian yang dilakukan bermanfaat langsung kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat serta dijadikan sebagai bahan referensi kebijakan dalam pembangunan di Kabupaten Sambas dan membuat usulan penambahan tenaga fungsional peneliti dan tenaga fungsional perekayasa kepada Bupati Sambas melalui BKPSDMAD Kabupaten Sambas.
- m) Membentuk Tim Inovasi Daerah dan Tim Telaah Inovasi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sambas. Tetapi untuk mempercepat akselerasi inovasi Kabupaten Sambas, maka perlu menyusun Peraturan Bupati Sambas Tentang Inovasi Daerah.

3. Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemda

Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemda Tahun 2022 ditargetkan Predikat “WTP”, namun sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian opini BPK terhadap laporan keuangan Pemda untuk mengukur peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintah. Pengukuran sebagaimana dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut :

a) **Tingkat Sistem Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah**

Tingkat sistem pengelolaan dan aset daerah kabupaten sambas pada tahun 2022 dengan kategori tinggi, hal ini telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu kategori sedang. Keberhasilan dalam pencapaian ini bisa dicapai melalui penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas yang disusun sesuai standar akuntansi pemerintah dengan berlandaskan pada sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

b) **Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) Terintegrasi**

Maturitas sistem penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Sambas telah mendapat Nilai 3,040 atau telah memenuhi karakteristik maturitas SPIP pada level 3 (terdefinisi).

Perbandingan target dan capaian opini BPK terhadap laporan keuangan pemda pada tahun 2021-2022, realisasi capaian beberapa tahun terakhir, realisasi capaian kinerja dengan target akhir RPJMD dan target nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 74
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemda Tahun 2021-2022

No	Indikator	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda	WTP	WTP	100%	WTP	N/A	N/A

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sambas Tahun 2022

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda pada Tahun 2021 ditargetkan mendapat WTP dan pada saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). sedangkan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda pada Tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu WTP dengan capaian kinerja 100% dan dikategorikan berhasil.



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 75
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemda Tahun 2019-2022

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda	WTP	WTP	WTP	N/A

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada Opini BPK terhadap laporan keuangan pemda mendapat predikat WTP dari tahun 2019-2021, sedangkan pada tahun 2022 masih dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tabel 76
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemda dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Tahun 2022		Target Akhir RPJMD	Target Nasional
		Target	Realisasi		
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda	WTP	N/A	WTP	Tidak Ada

Sumber: Badan Perencanaan Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi opini BPK terhadap laporan keuangan pemda pada tahun 2022 masih dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga belum bisa diukur pencapaian sampai akhir RPJMD dan tidak terdapat target nasional dalam pencapaian kinerja indikator opini BPK terhadap laporan keuangan pemda.

Hambatan/Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemda adalah adanya perubahan peratran perundang-undangan yang mengakibatkan penyesuaian pada sistem aplikasi pelaporan barang milik daerah dan masih terdapat barang milik daerah khususnya asset atanah yang bermasalah dengan pihak lain. Selain itu sulitnya dalam pengumpulan evidence (bukti dukung) dan komitmen dari kepala perangkat daerah dalam pengisian pada aplikasi SPIP.



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja antara lain :

- Percepatan realisasi pertanggungjawaban pendapatan dan belanja yang dilengkapi dengan bukti transaksi yang sah dan melaksanakan rekonsiliasi atas realisasi pendapatan dan belanja secara konsiten setiap tri wulan dalam tahun anggaran berjalan.
- Percepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah kabupaten sambas dan hasil reviu sebelum diserahkan LKPD unaudit diserahkan kepada BPK.
- Merencanakan penggantian aplikasi sesuai ketentuan yang berlaku agar mampu secara handal mendukung dalam pelaporan barang milik daerah dan memberikan penegasan kepemilikan kepada pihak yang mengklaim serta mengumpulkan dokumen untyk menguatkan status kepemilikan asset.
- Mendorong perbaikan penyelenggaraan sistem pengendalian interna pemerintah secara terus menerus sebagai proses yang integrasi dalam seluruh Tindakan dan kegiatan oleh pimpinan dan pegawai dalam pencapaian tujuan pemerintah daerah.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 6 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 77
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 6

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governanve	Program Administrasi Umum	6.423.389.050,00	6.396.277.366,00	99,58
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.750.091.517,00	2.738.484.163,00	99,58
		Program Pengelolaan Perbatasan	135.279.531,00	134.959.131,00	99,76
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	31.911.279.252,00	31.496.589.879,00	98,70
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	20.083.504.614,00	19.655.108.511,00	97,87
		Program Kepegawaian Daerah	2.388.862.084,00	2.338.266.632,00	97,88
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.028.002.640,00	994.409.695,00	96,73



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.580.970.293,00	1.493.563.058,00	94,47
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.304.190.641,00	1.166.222.705,00	89,42
		Program Pendaftaran Penduduk	600.406.538,00	563.303.596,00	93,82
		Program Pencatatan Sipil	59.854.776,00	50.752.823,00	84,79
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	14.980.340,00	11.614.328,00	77,53
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	94.879.614,00	93.508.439,00	98,55
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.322.225.820,00	1.291.539.828,00	97,68
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	797.313.223,00	795.828.243,00	99,81
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	121.140.357,00	119.508.507,00	98,65
		Program Penyelenggaraan Persandian Dan Pengamanan Informasi	35.043.217,00	31.981.971,00	91,26
		Program Pengelolaan Arsip	524.461.184,00	492.982.050	94,00
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	206.626.229,00	178.562.129	86,42
		Program Perizinan Penggunaan Arsip	37.197.256,00	36.240.791,00	97,43
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.161.016.531,00	1.058.681.670,00	91,19
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	285.451.058.183,00	276.269.192.714,00	96,78
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.274.919.236,00	1.168.954.963,00	91,69
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.086.786.378,00	2.045.298.602	98,01
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.299.252.933,00	1.866.549.658,00	81,18
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	360.010.695,00	286.832.395,00	79,67
Realisasi Anggaran					96,92
Capaian Kinerja					N/A
Tingkat Efisiensi					N/A

Berdasarkan tabel tersebut di atas persentase realisasi anggaran sebesar 96,92 persen namun realisasi capaian kinerja pada sasaran dan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat diukur dikarenakan hasil Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemda belum dirilis.



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

SASARAN 7 “Meningkatnya Status Kemajuan Mandiri”

“Meningkatnya Status kemajuan mandiri” merupakan sasaran strategis untuk mencapai misi “*Meningkatkan kemandirian ekonomi melalui pengembangan potensi unggulan local dan investasi.*” Tingkat keberhasilan sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas. Untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2022 didukung APBD dengan 7 (tujuh) program dengan anggaran sebesar Rp 6.469.738.675,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 6.439.670.260,00 atau 99,54 persen dari anggarannya.

Adapun capaian indikator kinerja pada Sasaran 7 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 78
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Desa Mandiri	Desa	80	119	148,75

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah desa mandiri telah mencapai target yang telah ditentukan sebesar 80 desa dengan realisasi sebesar 119 desa dengan capaian 148,75 persen dan dikategorikan tercapai.

Analisis keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mencapai target dan realisasi sasaran 7 sebagaimana tabel diatas, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah Desa Mandiri

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi,



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Secara konvergen Pemerintah Daerah juga mendorong Pemerintah Desa di Kecamatan masing-masing agar data hasil evaluasi perkembangan desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) per Indeks dijadikan sebagai bagian dari acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam meningkatkan status desa mandiri karena telah dilakukan sinergitas pembangunan desa dan pembangunan daerah dengan menggunakan data yang sama yakni Data IDM antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Pemerintah Provinsi dan Pusat. Selain itu hasil pengukuran IDM dijadikan referensi dalam menganalisis masalah dan menyusun kebijakan serta menetapkan fokus lokasi intervensi pembangunan dan menjadi data dan informasi dasar bagi pembangunan desa sebagai raport dan barometer bagi desa.

Berdasarkan penetapan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa tahun 2022, di Kabupaten Sambas terdapat 119 Desa dengan status Desa Mandiri. Capaian ini melampaui target 80 Desa yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, status kemajuan dan kemandirian desa pada tahun 2022 yaitu 119 Desa Mandiri 64 Desa Maju dan 10 Desa Berkembang. Pada Tahun 2022 di Kabupaten Sambas tidak terdapat lagi Desa Tertinggal.

Perbandingan target dan capaian jumlah desa mandiri pada tahun 2021-2022, realisasi capaian beberapa tahun terakhir, realisasi capaian kinerja dengan target akhir RPJMD dan target nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 79
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Desa Mandiri
Tahun 2021-2022

No	Indikator	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Jumlah Desa Mandiri	41	65	158,54%	80	119	148,75%

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat jumlah desa mandiri pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 54 desa jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Tabel 80
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Desa Mandiri
Tahun 2019-2022

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Desa Mandiri	8	38	65	119

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah desa mandiri mengalami peningkatan yang sangat baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah desa mandiri pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan sebanyak 111 Desa jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Tabel 81
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah Desa Mandiri
dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Tahun 2022		Target Akhir RPJMD	Target Nasional
		Target	Realisasi		
1.	Jumlah Desa Mandiri	80	119	140	Tidak Ada

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi jumlah desa mandiri pada tahun 2022 telah mencapai 85 persen dari target akhir RPJMD dan tidak terdapat target nasional dalam pencapaian jumlah desa mandiri Kabupaten Sambas.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan jumlah desa mandiri di Kabupaten Sambas antara lain :



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

- Kurang tepatnya sasaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah yang dapat diintervensi untuk kemajuan dan kemandirian desa.
- Pemahaman yang salah terhadap status desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa.
- Minimnya Personil Perangkat daerah secara tupoksi yang menangani IDM.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja jumlah desa mandiri antara lain :

- Memasukkan program/kegiatan pembangunan desa dalam renja perangkat daerah dan menguatkan desa agar memaksimalkan anggaran desa dalam mewujudkan kemandirian desa.
- Melaksanakan pemutakhiran data IDM sesuai tahapan dan tepat waktu. Dan melaksanakan ekspose hasil pemutakhiran data IDM kepada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa.
- Memaksimalkan peran TPPI Kabupaten Sambas dan Pemerintah Desa dalam mendorong Pemutakhiran data IDM.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 7 dapat di lihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 82
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 7

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
7	Meningkatnya Status Kemajuan Mandiri	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	393.881.571,00	393.879.930,00	99,99
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	229.999.823,00	229.982.371,00	99,99
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	694.997.689,00	694.616.325,00	99,95
		Program Penataan Desa	56.999.267,00	56.793.800,00	99,64
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	31.801.379,00	31.704.900,00	99,70
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.700.654.626,00	3.686.161.370,00	99,61
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.667.999.725,00	1.454.103.577,00	87,18
Realisasi Anggaran					99,54
Capaian Kinerja					148,75
Tingkat Efisiensi					49,07

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas Tahun 2022



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan tabel tersebut di atas, apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,54 persen dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 148,75 persen, maka pada sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 49,07 persen.

SASARAN 8

“Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”

“Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan hidup” merupakan sasaran strategis untuk mencapai misi “*Mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.*” Tingkat keberhasilan sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas. Untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2022 didukung APBD dengan 7 (tujuh) program dengan anggaran sebesar Rp 13.387.252.549,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 12.745.925.314,00. atau 95,21 persen dari anggarannya.

Adapun capaian indikator kinerja pada Sasaran 3 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 83
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	65,60	67,20	102,43
Jumlah Rata-rata Persentase Capaian Kinerja Sasaran 8					102,60

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup telah mencapai target yang telah ditentukan sebesar 65,60 dengan realisasi sebesar 66,95 dengan capaian 102,60 persen dan dikategorikan tercapai.



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mencapai target dan realisasi sasaran 8 sebagaimana tabel diatas, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu yang lebih representatif dan komprehensif terhadap dinamika kualitas lingkungan dan problem pencemaran yang terjadi. Sehingga dapat digunakan sebagai bahan dasar perencanaan dan evaluasi program pengelolaan dan pengendalian pencemaran dalam mengambil kebijakan.

Pada Tahun 2022 IKLH Kabupaten Sambas mengalami penurunan sebesar 2,56 jika dibandingkan tahun 2021. Bila dibandingkan dari tahun 2019 indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Sambas relatif membaik dengan teris mengalami peningkatan sebesar 3,37. Kecenderungan peningkatan ini disebabkan adanya intervensi ketat pada pengendalian pencemaran air, udara dan lahan dengan berbagai upaya dan aksi dengan mengajak seluruh elemen pemangku kepentingan pembangun berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan. Pada Tahun 2022, Nilai IKA Kabupaten Sambas sebesar 55,00, IKU sebesar 92,58 dan IKTL sebesar 41,19.

Tabel 84
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2022

No	Indikator	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65	69,51	106,94	65,60	67,20	102,43

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten sambas pada tahun 2022 mengalami penurunan 2,56 jika dibandingkan dengan tahun 2021.



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 85
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 8 Tahun 2019-2022

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,83	66	69,51	67,20

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Sambas realtif membaik dari tahun 2019, hal ini dapat dilihat peningkatan sebesar 3,37 indeks kualitas lingkungan hidup dari tahun 2019.

Tabel 86
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Tahun 2022		Target Akhir RPJMD	Target Nasional
		Target	Realisasi		
1.	Jumlah Desa Mandiri	65,60	67,20	66,50	Tidak Ada

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa masih indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2022 telah mencapai target akhir RPJMD atau telah mencapai 101,05 persen dan tidak terdapat target nasional dalam pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Sambas.

Hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja indikator indeks kualitas lingkungan hidup, antara lain :

- Pengujian mutu air dipersyaratkan di laboratorium yang terakreditasi. Lokasi Laboratorium terakreditasi yang jauh di Pontianak, sehingga jarak tempuh sampel air dimulai dari titik pantau pengambilan sampel air ke Laboratorium Pontianak sangat jauh.
- Waktu dan frekuensi pemantauan yang sangat terbatas, hanya diambil dengan frekuensi 2 kali setahun. Idealnya minimal dilakukan 4 kali setahun sebagai pengumpulan, analisis dan interpretasi data untuk menghasilkan informasi yang benar- benar sesuai dengantujuan pemantauan.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan kegiatan.



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

- d) Masih perlu ditingkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi/pihak lain dalam hal kebutuhan data dan lainnya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja indikator indeks kualitas lingkungan hidup antara lain :

- Melakukan pengawasan dan pemantauan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dan anak-anak sungainya pada 10 lokasi pengambilan sampel sebagai intervensi pengawasan.
- Melakukan kampanye dan Aksi bersih-bersih sungai.
- Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Air dan pemasangan papan peringatan/himbauan.
- Melaksanakan tindakan dan penyelesaian pengaduan masyarakat.
- Melaksanakan konservasi, reboisasi pada lahan-lahan kritis.
- Menanam pohon pada ruang terbuka hijau.
- Melaksanakan Gerakan “Sedekah Oksigen” yaitu menanam 1 (satu) pohon berarti sudah menyumbang Oksigen untuk 2 (dua) Manusia.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 8 dapat di lihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 87
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 8

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
7	Meningkatnya Status Kemajuan Mandiri	Program Pengelolaan Persampahan	8.453.502.987,00	8.346.770.197,00	98.74
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.667.999.725,00	1.454.103.577,00	87.18
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	26.407.150,00	26.218.700,00	99.29
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	190.182.178,00	190.110.200	99.96
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.175.496.452,00	2.063.085.253,00	94.83
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	243.410.278,00	242.190.080,00	99.50



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	630.253.779,00	423.447.327,00	67,19
Realisasi Anggaran					95,21
Capaian Kinerja					102,43
Tingkat Efisiensi					10,05

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 95,21 persen dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 102,43 persen, maka pada sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,22 persen.

3.3 Realisasi Anggaran

3.3.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 yang diuraikan pada Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2022 ini merupakan rancangan LRA Tahun 2022 yang belum ditetapkan dengan peraturan daerah dan belum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

a. Pendapatan Daerah:

Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
Rp 1.817.453.170.380,00	Rp 1.706.791.764.495,35	93,9

Rincian per jenis pendapatan dapat dilihat sebagaimana tersebut di bawah ini:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rp 209.294.288.331,00	Rp 167.637.283.803,57	80,1
-----------------------	-----------------------	------

Berdasarkan target dan realisasi PAD di atas, capaian kinerja PAD Tahun 2022 sebesar 80,1 persen. Rincian PAD Tahun 2022 sebagai berikut:



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 88
Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022

Jenis Pendapatan	Target Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
Pajak Daerah	86.239.688.491,00	38.880.808.161,00	45,1
Hasil Restribusi Daerah	3.863.228.915,00	4.064.776.847,00	105,2
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.199.958.784,00	3.199.958.784,00	94,01
Lain-lain PAD yang sah	115.991.432.141,00	121.491.740.011,57	104,7
Jumlah	209.295.288.331,00	167.637.283.803,57	80,1

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022

2) Dana Perimbangan

Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%
Rp 1.283.892.996.811,00	Rp 1.228.592.294.306,5300	95,7

Berdasarkan target dan realisasi dana perimbangan di atas, capaian kinerja dana perimbangan tahun 2022 sebesar 95,7 persen, dengan rincian dana perimbangan tahun 2022 sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 89
Rincian Dana Perimbangan Tahun 2022

Jenis Pendapatan	Target Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
Dana Bagi Hasil	52.151.631.811,00,00	57.894.188.817,00,00	111
Dana Alokasi Umum (DAU)	804.339.073.000,00	800.659.904.617,00	99,5
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	127.230.109.000,00	122.212.754.672,00	96,1
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	300.172.183.000,00	247.825.446.200,53	82,6
Jumlah	1.283.892.996.811,00	1.228.592.294.306,53	95,7

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%
Rp 40.833.293.500,00	Rp 31.136.403.751,01	76,3



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan target dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah di atas, capaian kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2022 sebesar 76,3 persen. Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 90
Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022

Jenis Pendapatan	Target Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
Pendapatan Hibah	40.833.293.500,00	31.136.403.751,01	76,3
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
Jumlah	40.833.293.500,00	31.136.403.751,01	76,3

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022

b. Belanja Daerah

Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%
Rp 1.944.171.871.999,00	Rp 1,816.573.750.562,82	93,4

Berdasarkan target dan realisasi Belanja Daerah di atas, capaian kinerja Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar 93,4 persen. Keberhasilan kinerja sasaran tahun 2022 didukung oleh tersedianya input berupa anggaran belanja dalam APBD. Dukungan anggaran tersebut dalam bentuk belanja operasi dan belanja modal.

Tabel 91
Rincian Belanja Daerah pada Tahun 2022

Jenis Belanja	Target Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
Belanja Operasi	1.411.913.690.298,00	11.323.541.262.570,97	93,7
Belanja Modal	255.172.653.231,00	224.719.664.374,85	88,1
Belanja Tidak Terduga	8.341.464.650,00	672.956.554,00	8,1
Belanja Transfer	268.774.063.820,00	267.639.867.063,00	99,6
Jumlah Belanja Daerah	1.944.171.871.999,00	1,816.573.750.562,82	93,4

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022

RPJMD Kabupaten Sambas menetapkan bahwa pada dasarnya seluruh belanja daerah ditujukan guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sambas. Sesuai definisi belanja tidak langsung, belanja ini diperuntukkan bagi setiap program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan program yang mendukung masing-masing sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sambas, berikut disajikan anggaran dan realisasi belanja untuk setiap sasaran pada tahun 2022.

Tabel 92

Anggaran dan Realisasi Belanja Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Program yang dilaksanakan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1.	Sasaran : Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Daerah			
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	12.311.598.448,00	11.983.699.180,00	97.34
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	12.499.956,00	11.546.134,00	92.37
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	16.999.956,00	16.046.052,00	94.39
4	Program Pengembangan Ekspor	77.762.961,00	77.076.041,00	99.12
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.128.964.000,00	2.112.920.330,00	99.25
6	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	299.372.000,00	295.943.223,00	99.85
7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	357.213.853,00	356.471.167,00	99.79
8	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.596.984.054,00	8.577.085.910,00	89.37
9	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	18.643.174.295,00	18.486.007.218,00	99.16
10	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	132.841.431,00	131.474.300,00	98.97
11	Program Perizinan Usaha Pertanian	149.987.560,00	149.287.802,00	99.53
12	Program Penyuluhan Pertanian	9.505.382.419,00	6.846.708.715,00	72.03
13	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	3.672.005.525,00	3.660.958.971,00	99.70
14	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.823.551.722,00	2.807.530.155,00	99.43



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

No	Program yang dilaksanakan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
15	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	739.612.983,00	734.123.260,00	99.26
16	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	99.999.674,00	99.983.289,00	99.98
17	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	252.252.255,00	248.974.779,00	98.70
18	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	17.873.581,00	17.647.781,00	98.74
19	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	307.376.265,00	302.884.179,00	98.54
20	Program Perizinan Usaha Pertanian	25.752.871,00	25.752.871,00	100
21	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.113.057.887,00	1.083.650.780,00	97.36
22	Program Pemasaran Pariwisata	657.849.259,00	641.760.222,00	97.55
23	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	126.000.000,00	125.202.000,00	99.37
24	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	960.738.883,00	916.112.900,00	95.36
25	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	236.741.087,00	234.452.789,00	99.03
26	Program Promosi Penanaman Modal	63.649.415,00	63.667.779,00	99,99
27	Program Pelayanan Penanaman Modal	767.774.958,00	762.952.320,00	99.37
28	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	425.749.000,00	425.248.230,00	99.88
29	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	150.000.000,00	149.373.400,00	99.58
30	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	850.070.324,00	819.654.126,00	96,42
31	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	902.417.509,00	896.712.124,00	99.37
32	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	59.132.000,00	55.094.977,00	93.17
33	Program Pengembangan UMKM	139.780.000,00	139.671.000,00	99.92
34	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	627.452.000,00	524.485.438,00	83.59
Jumlah Sasaran 1		67.671.130.298,00	63.229.056.335,00	93,44



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

No	Program yang dilaksanakan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
2.	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			
1	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	130.563.963,00	129.646.864,00	99,30
2	Program Rehabilitasi Sosial	335.602.659,00	329.808.512,00	98,27
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	262.332.893,00	259.135.290,00	98,78
4	Program Penanganan Bencana	128.784.824,00	122.645.800,00	95,09
5	Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan	77.958.987,00	77.874.899,00	99,89
6	Program Pemberdayaan Sosial	39.999.153,00	39.678.645,00	99,20
7	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	4.015.758.254,00	3.891.502.750,00	96,91
8	Program Pengelolaan Pendidikan	161.504.344.486,00	149.518.945.433,00	99,20
9	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	209.410.960.603,00	199.803.733.944,66	95,41
10	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	2.478.827.743,00	2.435.942.925,00	98,27
11	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	445.836.337,00	425.678.000,00	95,48
12	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	948.506.265,00	934.265.345,00	98,50
13	Program Pembinaan Perpustakaan	7.618.432.037,00	7.572.484.618,00	99,40
14	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	77.256.342,00	76.221.115,00	98,66
15	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.249.041.654,00	1.243.917.165,00	99,59
16	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	247.000.000,00	243.825.200,00	98,71
17	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	12.233.806.724,00	12.184.037.250,00	99,59
18	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	499.999.167,00	497.821.289,00	99,56
19	Program Perlindungan Perempuan	295.000.442,00	294.999.869,00	99,99
20	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	715.588.509,00	713.459.124,00	99,70
21	Program Pemenuhan Hak Anak	865.688.664,00	858.438.600,00	99,16
22	Program Perlindungan Khusus Anak	739.310.497,00	738.646.208,00	99,91
23	Program Pengendalian Penduduk	599.594.399,00	599.582.622,00	99,99
24	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.397.336.595,00	6.371.621.722,00	99,60



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

No	Program yang dilaksanakan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
25	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.327.694.863,00	1.418.616.512,00	42,63
Jumlah Sasaran 2		414.645.226.060,00	390.782.349.702,00	94.24
3.	Sasaran : Meningkatnya Kesempatan Kerja			
1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	8.684.996.808,00	8.674.059.754,00	99,87
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.766.790.151,00	1.764.194.444,00	99,85
3	Program Hubungan Industrial	5.08.435.550,00	506.327.770,00	95,59
Jumlah Sasaran 3		10.960.222.509,00	10.944.581.968,00	99.86
4.	Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan dan Perlindungan Terhadapp Bencana			
1	Program Penanggulangan Bencana	736.093.481,00	735.454.462,00	99.91
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	585.983.254,00	585.983.254	100
3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	194.393.314,00	193.694.482,00,00	99.64
Jumlah Sasaran 4		1.516.470.049,00	1.515.132.198,00	99,91
5.	Sasaran : Meningkatnya Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap Untuk Mendukung Perekonomian Daerah			
1	Program Penyelenggaraan Jalan	160.073.544.220,00	130.667.573.434,00	81,63
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	345.388.466,00	273.816.650	79,28
3	Program Penataan Bangunan Gedung	12.597.398.503,00	8.901.957.150	70,67
4	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	6.517.362.771,00	4.870.157.000,00	74,73
5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	45.588.208.873,00	40.079.664.588,00	82,49
6	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	33.198.249.040,00	32.991.563.039,00	99,38
7	Program Pengelolaan Pelayaran	1.778.508.712,00	1.764.813.288,00	99,23
8	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	20.489.233.218,00	17.856.829.772,00	87,15
9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.087.129.686,00	5.599.150.151,00	91,98
10	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	11.986.523.243,00	8.705.532.449.	72,63
11	Program Pengembangan Permukiman	41.562.050.143,00	33.979.303.179	81,76
12	Program Pengembangan Perumahan	691.001.957,00	648.056.444,00	93,79
13	Program Kawasan Permukiman	253.883.182,00	203.662.987,00	8,22



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

No	Program yang dilaksanakan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
14	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	411.000.133,00	212.114.100,00	51,61
Jumlah Sasaran 5 :		344.579.482.147,00	286.754.194.231,00	83,22
6.	Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)			
1	Program Administrasi Umum	6.423.389.050,00	6.396.277.366,00	99,58
2	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.750.091.517,00	2.738.484.163,00	99,58
3	Program Pengelolaan Perbatasan	135.279.531,00	134.959.131,00	99,76
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	31.911.279.252,00	31.496.589.879,00	98,70
5	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	20.083.504.614,00	19.655.108.511,00	97,87
6	Program Kepegawaian Daerah	2.388.862.084,00	2.338.266.632,00	97,88
7	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.028.002.640,00	994.409.695,00	96,73
8	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.580.970.293,00	1.493.563.058,00	94,47
9	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.304.190.641,00	1.166.222.705,00	89,42
10	Program Pendaftaran Penduduk	600.406.538,00	563.303.596,00	93,82
11	Program Pencatatan Sipil	59.854.776,00	50.752.823,00	84,79
12	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	14.980.340,00	11.614.328,00	77,53
13	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	94.879.614,00	93.508.439,00	98,55
14	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.322.225.820,00	1.291.539.828,00	97,68
15	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	797.313.223,00	795.828.243,00	99,81
16	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	121.140.357,00	119.508.507,00	98,65
17	Program Penyelenggaraan Persandian Dan Pengamanan Informasi	35.043.217,00	31.981.971,00	91,26
18	Program Pengelolaan Arsip	524.461.184,00	492.982.050	94,00
19	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	206.626.229,00	178.562.129	86,42
20	Program Perizinan Penggunaan Arsip	37.197.256,00	36.240.791,00	97,43
21	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.161.016.531,00	1.058.681.670,00	91,19
22	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	285.451.058.183,00	276.269.192.714,00	96,78



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

No	Program yang dilaksanakan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
23	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.274.919.236,00	1.168.954.963,00	91,69
24	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.086.786.378,00	2.045.298.602	98,01
25	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.299.252.933,00	1.866.549.658,00	81,18
26	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	360.010.695,00	286.832.395,00	79,67
Jumlah Sasaran 6 :		367.349.136.225,00	356.027.359.546,00	96,92
7.	Sasaran : Meningkatnya Status Kemajuan Desa			
1	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	393.881.571,00	393.879.930,00	99,99
2	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	229.999.823,00	229.982.371,00	99,99
3	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	694.997.689,00	694.616.325,00	99,95
4	Program Penataan Desa	56.999.267,00	56.793.800,00	99,64
5	Program Peningkatan Kerjasama Desa	31.801.379,00	31.704.900,00	99,70
6	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.700.654.626,00	3.686.161.370,00	99,61
7	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.667.999.725,00	1.454.103.577,00	87,18
Jumlah Sasaran 7 :		6.469.738.675,00	6.439.670.260,00	99,54
8.	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			
1	Program Pengelolaan Persampahan	8.453.502.987,00	8.346.770.197,00	98,74
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.667.999.725,00	1.454.103.577,00	87,18
3	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	26.407.150,00	26.218.700,00	99,29
4	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	190.182.178,00	190.110.200	99,96
5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.175.496.452,00	2.063.085.253,00	94,83
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	243.410.278,00	242.190.080,00	99,50
7	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	630.253.779,00	423.447.327,00	67,19
Jumlah Sasaran 8 :		13.387.252.549,00	12.745.925.314,00	95,21

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022



4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2022 merupakan pelaksanaan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan *good governance* tahun Pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sambas sebagaimana ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026. Tujuan penyusunan laporan ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan gambaran terhadap tingkat pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam mencapai visi dan misi. Laporan ini merupakan laporan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sambas 2016-

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 21 (sepuluh) indikator kinerja, maka dapat dilihat bahwa beberapa indikator telah dapat mencapai target dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Namun demikian terdapat pula indikator yang belum tercapai dan masih belum ada hasil dalam perjanjian kinerja, akan tetapi secara keseluruhan pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas pada tahun 2022 dapat dikatakan tercapai.

Berikut ini adalah hasil pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2022 sebagai berikut :

1. Indikator Pertumbuhan Ekonomi dengan nilai capaian kinerja sebesar 147,78 persen dan dikategorikan berhasil;
2. Indikator Indeks Gini dengan nilai capaian kinerja sebesar 105,85 persen dan dikategorikan berhasil;
3. Indikator Angka Kemiskinan dengan nilai capaian kinerja sebesar 105,20 persen dan dikategorikan berhasil;
4. Indikator Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai capaian sebesar 9799,69 persen dan dikategorikan berhasil;
5. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan nilai capaian kinerja sebesar 100,4 dan dikategorikan tidak berhasil;
6. Indikator Rata-Rata Lama Sekolah dengan nilai capaian kinerja sebesar 97,12 persen dan dikategorikan tidak berhasil;
7. Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) dengan capaian kinerja sebesar 93,56 persen dan dikategorikan tidak berhasil;



BAB 4 PENUTUP

8. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dengan capaian kinerja sebesar 65,74 persen dan dikategorikan tidak berhasil;
9. Indikator Indeks Resiko Bencana dengan capaian kinerja sebesar 105,26 persen dan dikategorikan berhasil;
10. Indikator Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap dengan capaian kinerja sebesar 100,12 persen dan dikategorikan berhasil;
11. Indikator Persentase Jalan Poros Desa Dalam Kondisi Mantap dengan capaian kinerja sebesar 110,58 persen dan dikategorikan berhasil;
12. Indikator Rasio Jaringan Irigasi dengan capaian kinerja sebesar 101,18 persen dan dikategorikan berhasil;
13. Indikator Rasio Tersedianya Dermaga / Steher Untuk Melayani Aksesibilitas Orang dan Barang dengan capaian kinerja sebesar 99,07 persen dan dikategorikan tidak berhasil;
14. Indikator Persentase Rumah Tangga yang menempati Hunian dengan Akses Air Minum dengan capaian kinerja sebesar 101,24 persen dan dikategorikan berhasil;
15. Indikator Persentase Rumah Tangga Bersanitasi dengan capaian kinerja sebesar 100,08 persen dan dikategorikan berhasil;
16. Indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni dengan capaian kinerja sebesar 100,09 persen dan dikategorikan berhasil;
17. Indikator Nilai SAKIP, dengan capaian kinerja sebesar 90,48 persen dan dikategorikan tidak berhasil;
18. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi, dengan capaian kinerja sebesar 90,97 persen dan dikategorikan tidak berhasil;
19. Indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemda, karena belum ada rilis resmi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK);
20. Indikator Jumlah Desa Mandiri, dengan capaian kinerja sebesar 148,75 persen dan dikategorikan berhasil;
21. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dengan capaian kinerja sebesar 102,43 persen dan dikategorikan berhasil;



Pencapaian target kinerja dalam perjanjian dilaksanakan melalui program-program kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud berjumlah sebesar Rp 1.226.578.658.512,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 1.128.438.269.574,00 atau 92 persen

Beberapa hal yang menjadi perhatian terkait hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2021 antara lain:

1. Laju pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkat namun masih dibayangi oleh dampak negatif pandemi covid 19, ancaman resesi global dan perubahan iklim.
2. Masih rendahnya infrastruktur dalam kondisi mantap sehingga kurang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kabupaten Sambas.
3. Tingkat pengangguran terbuka yang masih cenderung meningkat ditengah kondisi ekonomi yang mulai membaik.
4. Jumlah penduduk miskin yang masih tergolong tinggi dan persentase kemiskinan masih diatas rata-rata Provinsi Kalimantan Barat.
5. Indeks pembangunan manusia yang sudah cukup baik di Kalimantan Barat, namun masih dihadapkan pada kondisi rendahnya angka Rata-Rata Lama Sekolah (RTLS) dan Angka Harapan Hidup (AHH).
6. Masih tingginya potensi terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan, aktivitas masyarakat dan akibat dampak bencana alam.
7. Masih tingginya Indeks Resiko Bencana Daerah terutama yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, banjir, kekeringan, abrasi dan cuaca ekstrim.
8. Belum optimalnya penerapan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.

4.2 Langkah-langkah Untuk Meningkatkan Kinerja

Permasalah dan hambatan dalam mencapai kinerja bukan menjadi alasan untuk tidak meningkatkan kinerja dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya :

1. Meningkatkan komitmen seluruh pimpinan dalam penerapan manajemen kinerja melalui pengintegrasian sistem perencanaan kinerja dan penganggaran serta meningkatkan kualitas mekanisme sistem pengukuran kinerja organisasi dan



BAB 4 PENUTUP

individu, sebagai sarana pemantauan kinerja oleh pimpinan dan juga sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;

2. Melaksanakan reviu terhadap dokumen SAKIP kabupaten dan perangkat daerah agar terjamin kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan (*integrated development plan*), serta mekanisme *cascade* kerja sehingga dokumen perencanaan lebih berorientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan masyarakat (*result oriented*),
3. Lebih memperhatikan pencapaian target kinerja jangka menengah, tidak hanya kinerja kabupaten tapi sampai dengan kinerja perangkat daerah.
4. Menyusun Peraturan teknis terkait evaluasi internal yang dilaksanakan oleh APIP dalam melaksanakan evaluasi kepada seluruh perangkat daerah.
5. Membangun aplikasi e-SAKIP Kabupaten Sambas yang merupakan sistem pengelolaan data kinerja terpadu yang bisa diunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintahan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Evaluasi RKPD.



Sambas, Maret 2023

BUPATI SAMPAS

H. SATONO, S.Sos.I., M.H.

Lampiran

**PENGUKURAN KINERJA
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kemandirian Perekonomian Daerah	1. Pertumbuhan Ekonomi	-	3,14	4,64	147,78
2.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	2. Indeks Gini	-	0,271	0,256	105,85 %
		3. Angka Kemiskinan	-	7,28	6,92	105,20 %
		4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	68,16	67,95	99,69 %
		5. Harapan Lama Sekolah (HLS)	-	12,65	12,7	100,40 %
		6. Rata-Rata Lama Sekolah (RTLs)	-	6,94	6,74	97,12 %
		7. Angka Harapan Hidup (AHH)	-	74,17	69,39	93,56 %
3.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	8. Tingkat Pengangguran Terbuka	-	3,34	5,08	65,74
4.	Meningkatnya Pengelanaan dan Perlindungan Terhadap Bencana	9. Indeks Resiko Bencana	-	163,59	155,41	105,26
5.	Meningkatnya Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap Untuk Mendukung Perekonomian Daerah	10. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	%	68,62	68,70	100,12
		11. Persentase Jalan Poros Desa Dalam Kondisi Mantap	%	61,60	68,12	110,58
		12. Rasio Jaringan Irigasi	%	31,20	31,57	101,18
		13. Rasio Tersedianya Dermaga / Stegheer Untuk Melayani Aksesibilitas Orang dan Barang	%	63,56	62,97	99,07
		14. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum	%	58,78	59,51	101,24
		15. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	%	82,66	82,73	100,08
		16. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	80,39	80,46	100,09
6.	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)	17. Nilai SAKIP	-	70 (BB)	63,34 (B)	90,48 %
		18. Indeks Reformasi Birokrasi	-	80 (BB)	63,68 (B)	90,97 %
		19. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda	-	WTP	N/A	N/A
7.	Meningkatnya Status Kemajuan Mandiri	20. Jumlah Desa Mandiri	Desa	80	119	148,75
8.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	21. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	65,60	67,20	102,43



BUPATI SAMBAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. SATONO, S.Sos, I.M.H.**

Jabatan : **BUPATI SAMBAS**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sambas, Januari 2022



BUPATI SAMBAS,

H. SATONO, S.Sos, I.M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah	1.	Pertumbuhan Ekonomi	2,32
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	2.	Indeks Gini	0,273
		4.	Angka Kemiskinan	7,49
		5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,60 %
3.	Meningkatkan kesempatan kerja	3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,53 %
4.	Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana	6.	Indeks Resiko Bencana	144,38 %
5.	Meningkatnya penyediaan infrastruktur yang mantap untuk mendorong perekonomian daerah	7.	Persentase Infrastruktur dalam kondisi mantap	68,85 %
6.	Meningkatnya kualitas dan tata Kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	8.	Indeks Reformasi Birokrasi	A
		9.	Nilai SAKIP	BB
		10.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP
7.	Meningkatnya status kemajuan desa	11.	Jumlah Desa Mandiri	65
8.	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	12.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,25 %

No.	Program	Anggaran	
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp.	280.357.491,00
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp.	700.774.509,00
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp.	50.000.000,00
4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp.	281.686.966,00
5	Program Promosi Penanaman Modal	Rp.	63.649.415,00
6	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp.	680.487.187,00
7	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.	403.597.000,00
8	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp.	135.000.000,00
9	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp.	73.455.640,00
10	Program Pemasaran Pariwisata	Rp.	265.010.753,00
11	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	Rp.	38.999.403,00
12	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp.	941.579.086,00
13	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.	7.660.311.886,00

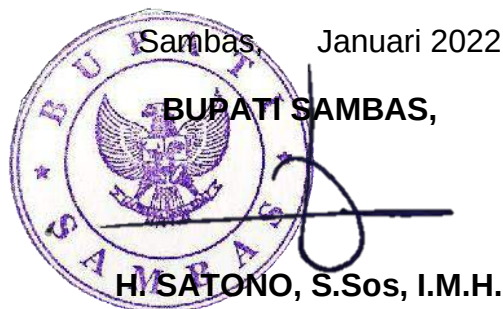
No.	Program		Anggaran
14	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.	12.365.996.427,00
15	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp.	507.534.629,00
16	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp.	149.987.560,00
17	Program Penyuluhan Pertanian	Rp.	9.481.776.177,00
18	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp.	2.372.078.778,00
19	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp.	2.158.555.614,00
20	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp.	824.613.334,00
21	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp.	49.999.789,00
22	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.	1.774.584.562,00
23	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.	17.873.581,00
24	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp.	130.783.170,00
25	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp.	25.753.152,00
26	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp.	219.372.000,00
27	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	1.828.964.000,00
28	Program Stabilitasii Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.	357.213.853,00
29	Program Pengembangan Ekspor	Rp.	52.786.147,00
30	Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	Rp.	12.161.598.448,00
31	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp.	12.499.956,00
32	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.	16.999.956,00
33	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp.	607.452.000,00
34	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp.	99.949.658,00
35	Program Rehabilitasi Sosial	Rp.	165.010.707,00
36	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	262.333.720,00
37	Program Penanganan Bencana	Rp.	113.168.800,00
38	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp.	74.509.807,00
39	Program Pemberdayaan Sosial	Rp.	39.999.564,00
40	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	8.471.023.871,00
41	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp.	1.615.714.365,00
42	Program Hubungan Industrial	Rp.	408.436.437,00
43	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp.	157.663.985.572,00
44	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp.	4.165.993.145,00
45	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	171.576.191.697,00
46	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp.	445.836.091,00
47	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp.	770.359.942,00
48	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	924.999.974,00
49	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.	865.688.728,00
50	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp.	589.310.979,00
51	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.	99.999.922,00
52	Program Perlindungan Perempuan	Rp.	245.000.545,00

No.	Program	Anggaran
53	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 715.589.669,00
54	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 599.599.332,00
55	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rp. 6.017.233.629,00
56	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 3.227.694.863,00
57	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 7.743.810.069,00
58	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 6.432.765.893,00
59	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp. 78.954.342,00
60	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 959.035.197,00
61	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 100.000.000,00
62	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 736.127.781,00
63	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 636.017.754,00
64	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 199.999.506,00
65	Program Penatagunaan Tanah	Rp. 71.005.703,00
66	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 8.233.844.670,00
67	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 153.970.093.818,00
68	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 199.999.952,00
69	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 12.971.078.483,00
70	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 4.673.921.249,00
71	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 24.722.765.419,00
72	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 1.384.576.750,00
73	Program Pengeloaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 10.316.630.598,00
74	Program Pengembangan Permukiman	Rp. 34.014.600.250,00
75	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 591.000.671,00
76	Program Kawasan Permukiman	Rp. 316.895.021,00
77	Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	Rp. 202.000.245,00
78	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 33.412.427.778,00
79	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 13.632.754.983,00
80	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 5.753.500.536,00
81	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 525.054.742,00
82	Program Pengelolaan Arsip	Rp. 413.792.258,00
83	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp. 210.456.007,00
84	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Rp. 37.197.256,00
85	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp. 119.131.438,00
86	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 30.021.003,00
87	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 31.306.269.148,00
88	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 13.246.059.302,00
89	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 2.270.129.892,00
90	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 647.991.640,00
91	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 1.217.657.281,00
92	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 33.125.363.929,00
93	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 1.399.789.883,00

No.	Program	Anggaran
94	Program Pengelolaan Perbatasan	Rp. 75.423.956,00
95	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 2.198.810.136,00
96	Program Pencatatan Sipil	Rp. 533.561.340,00
97	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 1.202.204.563,00
98	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 100.279.614,00
99	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 811.613.743,00
100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 1.742.051.739,00
101	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 486.423.697,00
102	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 1.722.813.631,00
103	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 982.180.885,00
104	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.580.999.618,00
105	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1.264.982.641,00
106	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 280.270.413.972,00
107	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.189.919.266,00
108	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.571.929.493,00
109	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 2.364.882.658,00
110	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 492.228.695,00
111	Program Penataan Desa	Rp. 39.999.501,00
112	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 39.999.656,00
113	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 3.004.831.280,00
114	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.271.020.087,00
115	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp. 393.881.571,00
116	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 229.999.823,00
117	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp. 694.999.823,00
118	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp. 1.725.155.252,00
119	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 220.044.935,00
120	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp. 556.842.720,00
121	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.649.999.725,00
122	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 29.954.866,00
123	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 199.999.805,00
Jumlah Keseluruhan		Rp. 1.130.336.132.559,00

Sambas, Januari 2022

BUPATI SAMBAS,



H. SATONO, S.Sos, I.M.H.



BUPATI SAMBAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. SATONO, S.Sos, I.M.H.**

Jabatan : **BUPATI SAMBAS**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sambas, 2022


BUPATI SAMBAS,

H. SATONO, S.Sos, I.M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah	1. Pertumbuhan Ekonomi	3.14
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	2. Indeks Gini	0,271
		3. Angka Kemiskinan	7,28
		4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,16
		5. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12.65
		6. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	6.94
		7. Angka Harapan Hidup (AHH)	74.17
3.	Meningkatkan kesempatan kerja	8. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,34
4.	Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana	9. Indeks Resiko Bencana	163,59
5.	Meningkatnya Infrastruktur dalam kondisi mantap untuk mendukung perekonomian daerah	10. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	68,62
		11. Persentase Jalan Poros Desa Dalam Kondisi Mantap	61.60
		12. Rasio Jaringan Irigasi	31.20
		13. Rasio Tersedianya Dermaga/Steher Untuk Melayani Akseibilitas Orang dan Barang	63.56
		14. Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum	58.78
		15. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	82.66
		16. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	80.29
6.	Meningkatnya kualitas dan tata Kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	17. Indeks Reformasi Birokrasi	BB
		18. Nilai SAKIP	BB
		19. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP
7.	Meningkatnya status kemajuan desa	20. Jumlah Desa Mandiri	80
8.	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	21. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,50 %

No.	Program	Anggaran
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 280.357.491,00
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 700.774.509,00
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 50.000.000,00

No.	Program	Anggaran
4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 281.686.966,00
5	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 63.649.415,00
6	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 680.487.187,00
7	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 403.597.000,00
8	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 135.000.000,00
9	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 73.455.640,00
10	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 265.010.753,00
11	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	Rp. 38.999.403,00
12	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 941.579.086,00
13	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 7.660.311.886,00
14	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 12.365.996.427,00
15	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 507.534.629,00
16	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp. 149.987.560,00
17	Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 9.481.776.177,00
18	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.372.078.778,00
19	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 2.158.555.614,00
20	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp. 824.613.334,00
21	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 49.999.789,00
22	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 1.774.584.562,00
23	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 17.873.581,00
24	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 130.783.170,00
25	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp. 25.753.152,00
26	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 219.372.000,00
27	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 1.828.964.000,00
28	Program Stabilitasii Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 357.213.853,00
29	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 52.786.147,00
30	Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	Rp. 12.161.598.448,00
31	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 12.499.956,00
32	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 16.999.956,00
33	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 607.452.000,00
34	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 99.949.658,00
35	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 165.010.707,00
36	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 262.333.720,00
37	Program Penanganan Bencana	Rp. 113.168.800,00
38	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 74.509.807,00
39	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 39.999.564,00
40	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 8.471.023.871,00
41	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 1.615.714.365,00

No.	Program	Anggaran
42	Program Hubungan Industrial	Rp. 408.436.437,00
43	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 157.663.985.572,00
44	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 4.165.993.145,00
45	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 171.576.191.697,00
46	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 445.836.091,00
47	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 770.359.942,00
48	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 924.999.974,00
49	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 865.688.728,00
50	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 589.310.979,00
51	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 99.999.922,00
52	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 245.000.545,00
53	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 715.589.669,00
54	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 599.599.332,00
55	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rp. 6.017.233.629,00
56	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 3.227.694.863,00
57	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 7.743.810.069,00
58	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 6.432.765.893,00
59	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp. 78.954.342,00
60	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 959.035.197,00
61	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 100.000.000,00
62	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 736.127.781,00
63	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 636.017.754,00
64	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 199.999.506,00
65	Program Penatagunaan Tanah	Rp. 71.005.703,00
66	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 8.233.844.670,00
67	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 153.970.093.818,00
68	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 199.999.952,00
69	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 12.971.078.483,00
70	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 4.673.921.249,00
71	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 24.722.765.419,00
72	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 1.384.576.750,00
73	Program Pengeloaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 10.316.630.598,00
74	Program Pengembangan Permukiman	Rp. 34.014.600.250,00
75	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 591.000.671,00
76	Program Kawasan Permukiman	Rp. 316.895.021,00
77	Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	Rp. 202.000.245,00
78	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 33.412.427.778,00
79	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 13.632.754.983,00
80	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 5.753.500.536,00

No.	Program	Anggaran
81	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 525.054.742,00
82	Program Pengelolaan Arsip	Rp. 413.792.258,00
83	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp. 210.456.007,00
84	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Rp. 37.197.256,00
85	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp. 119.131.438,00
86	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 30.021.003,00
87	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 31.306.269.148,00
88	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 13.246.059.302,00
89	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 2.270.129.892,00
90	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 647.991.640,00
91	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 1.217.657.281,00
92	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 33.125.363.929,00
93	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 1.399.789.883,00
94	Program Pengelolaan Perbatasan	Rp. 75.423.956,00
95	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 2.198.810.136,00
96	Program Pencatatan Sipil	Rp. 533.561.340,00
97	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 1.202.204.563,00
98	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 100.279.614,00
99	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 811.613.743,00
100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 1.742.051.739,00
101	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 486.423.697,00
102	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 1.722.813.631,00
103	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 982.180.885,00
104	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.580.999.618,00
105	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1.264.982.641,00
106	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 280.270.413.972,00
107	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.189.919.266,00
108	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.571.929.493,00
109	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 2.364.882.658,00
110	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 492.228.695,00
111	Program Penataan Desa	Rp. 39.999.501,00
112	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 39.999.656,00
113	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 3.004.831.280,00
114	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.271.020.087,00
115	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp. 393.881.571,00
116	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 229.999.823,00
117	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp. 694.999.823,00
118	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp. 1.725.155.252,00

No.	Program		Anggaran
119	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp.	220.044.935,00
120	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp.	556.842.720,00
121	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.	1.649.999.725,00
122	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.	29.954.866,00
123	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp.	199.999.805,00
Jumlah Keseluruhan		Rp.	1.130.336.132.559,00

Sambas, 2022

BUPATI SAMBAS,



H. SATONO, S.Sos.I.,M.H.



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

Jl. Pembangunan Nomor 82 (79462) Telp. (0562) 392454 Fax (0562) 392443
Email : setda.kab.sambas@gmail.com Website : www.sambas.go.id